



Laporan Akhir

ANALISIS ICOR SEKTORAL DIY 2015 - 2019

BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH, BAPPEDA DIY
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2020



Laporan Akhir

**ANALISIS
ICOR SEKTORAL
DIY
2015 - 2019**

KATA PENGANTAR

Dalam perencanaan pembangunan wilayah, pada umumnya pemerintah telah menentukan target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai selama periode tertentu. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah investasi. Perkembangan suatu sektor ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan nilai investasi yang ditanamkan pada sektor tersebut. Investasi akan meningkatkan kapasitas produksi dan pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Penyusunan publikasi *Analisis Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Sektoral Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2019* bertujuan untuk menyediakan informasi dalam rangka mengevaluasi tingkat efisiensi penggunaan barang modal dalam proses produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Berdasarkan angka ICOR menurut lapangan usaha, maka dapat diestimasi kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan tertentu. Publikasi ini dapat terwujud berkat kerjasama antara Badan Pusat Statistik dengan BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saran dan kritik perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi sejenis pada masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih.

Bantul, Agustus 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Heru Margono

KATA SAMBUTAN

Kami menyambut baik diterbitkannya Publikasi “Analisis ICOR Sektoral Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2019”, sebagai hasil kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini merupakan lanjutan dari publikasi yang sama tahun-tahun sebelumnya.

Dalam publikasi ini, diuraikan distribusi investasi menurut sektor, dan juga dianalisis efisiensi investasi dalam menumbuhkan perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja. Yang lebih menarik dari publikasi ini adalah terdapat analisis kebutuhan dan pilihan investasi untuk suatu target pertumbuhan yang diinginkan. Kajian seperti ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pendukung bagi pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Kami berharap publikasi ini juga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pihak terkait. Kami berkomitmen bahwa dengan mendapat masukan dari para pakar dari akademisi dan instansi teknis, publikasi ini akan lebih baik dalam format, substansi, maupun penyajiannya di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya atas segala usaha yang telah dilakukan untuk menyelesaikan publikasi ini. Mudah-mudahan kerjasama antara BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta dengan BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan semakin erat dan dapat memberikan sumbangan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta,

Beny Suharsono

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
KATA SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Dasar Pelaksanaan.....	4
1.3. Ruang Lingkup.....	5
1.4. Maksud dan Tujuan.....	5
1.5. Sasaran dan Keluaran.....	6
1.6. Pembiayaan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Pengertian ICOR.....	9
2.2. Pengertian Investasi.....	13
2.2.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	15
2.2.2. Perubahan Inventori	18
2.3. Pengertian Output.....	19
2.4. Pengertian Nilai Tambah Bruto	20
2.5. Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODOLOGI.....	25
3.1. Sumber Data.....	25

3.2. Estimasi PMTB Lapangan Usaha.....	25
3.3. Penghitungan Pertambahan Output Lapangan Usaha	26
3.4. Metode Penghitungan ICOR	26
3.4.1. Metode Standar	26
3.4.2. Metode Akumulasi	28
3.4.3. <i>Time Lag</i> Investasi.....	29
3.4.4. Koefisien ICOR Negatif	29
3.4.5. Koefisien ICOR Positif dan Besar Serta Koefisien ICOR Negatif dan Besar.....	30
3.4.6. Asumsi Dasar	30
3.5. Indeks Perkembangan Agregat PDRB	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	34
4.2. Perkembangan Nilai Investasi	42
4.3. Struktur Investasi	43
4.4. Angka ICOR D.I. Yogyakarta.....	47
4.4.1. ICOR Total.....	47
4.4.2. ICOR menurut Lapangan Usaha	52
4.5. Kebutuhan Investasi	66
4.6. Hubungan ICOR, <i>Gross Domestic Investment</i> , <i>Gross Domestic Saving</i> , Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi	74
BAB V PENUTUP.....	80
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Rekomendasi	82
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha, 2015-2019 (Persen)	37
Tabel 4.2. Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Persen).....	39
Tabel 4.3. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Jabalnusra, 2015-2019 (Persen).....	41
Tabel 4.4. Perkembangan Nilai Investasi D.I. Yogyakarta, 2015-2019 (Juta Rupiah)	42
Tabel 4.5. Nilai Investasi D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga Berlaku, 2015-2019 (Juta Rupiah).....	46
Tabel 4.6. Nilai Investasi D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga Konstan 2010, 2015-2019 (Juta Rupiah).....	46
Tabel 4.7. ICOR Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, 2015-2019	48
Tabel 4.8. ICOR Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB, 2015-2019.....	49
Tabel 4.9. ICOR Provinsi se-Jabalnusra (Investasi = PMTB + Δ Inventori), 2015-2019.....	50
Tabel 4.10. ICOR Provinsi se-Jabalnusra (Investasi = PMTB), 2015-2019	51
Tabel 4.11. ICOR Lapangan Usaha Tahunan Metode Standar <i>Lag 0</i> Dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, 2015-2019.....	53
Tabel 4.12. ICOR Lapangan Usaha Tahunan Metode Standar <i>Lag 0</i> Dengan Pendekatan Investasi = PMTB, 2015-2019.....	54
Tabel 4.13. ICOR Lapangan Usaha Metode Akumulasi, <i>Lag 0</i> Dengan Pendekatan Investasi = PMTB dengan dan tanpa Perubahan Inventori, 2015-2019.....	56

Tabel 4.14.	ICOR Lapangan Usaha Metode Standar, Lag 0 Dengan Pendekatan Investasi = PMTB dengan dan tanpa Perubahan Inventori, 2015-2019.....	59
Tabel 4.15.	ICOR Lapangan Usaha Metode Standar Lag 0, Lag 1, dan Lag 2, Dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, 2015-2019.....	61
Tabel 4.16.	ICOR Lapangan Usaha Metode Standar Lag 0, Lag 1, dan Lag 2, Dengan Pendekatan Investasi = PMTB, 2015-2019	62
Tabel 4.17.	ICOR Lapangan Usaha Metode Standar dan Akumulasi, Indeks Perkembangan PDRB, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi, 2015-2019.....	65
Tabel 4.18.	Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta, 2020-2022	67
Tabel 4.19.	Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, 2020-2022	67
Tabel 4.20.	Penyerapan Tenaga Kerja D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha, 2017-2019.....	70
Tabel 4.21.	Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja menurut Kategori di D.I. Yogyakarta, 2016	72
Tabel 4.22.	Sebaran Perusahaan/Usaha non-Pertanian di Provinsi D.I. Yogyakarta menurut Skala Usaha, 2016	73
Tabel 4.23.	Perkembangan ICOR, GDI, GDS, LPE, dan Inflasi di D.I. Yogyakarta, 2015-2019	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan PMTB D.I. Yogyakarta, 2015-2019 (Persen)	34
Gambar 4.2. Rata-rata Tingkat Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha, 2015-2019 (Persen)	36
Gambar 4.3. Rerata Distribusi PDRB D.I. Yogyakarta menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Persen)	38
Gambar 4.4. Rerata Proporsi PMTB Terhadap Total Investasi D.I. Yogyakarta, 2015-2019	43
Gambar 4.5. Rerata Struktur Investasi D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha, 2015-2019	44
Gambar 4.6. Rerata Struktur Investasi D.I. Yogyakarta menurut Kelompok Industri, 2015-2019	45
Gambar 4.7. Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta, 2015-2019	47
Gambar 4.8. Distribusi Usaha/Perusahaan Non-Pertanian di D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota, 2016	73
Gambar 4.9. Kesenjangan Investasi dan Tabungan	75
Gambar 4.10. Perkembangan GDI dan GDS D.I. Yogyakarta, 2010-2019	77

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. PDRB D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2015-2019 (Juta Rupiah) ..	88
Lampiran 2. PDRB D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha, 2015-2019 (Juta Rupiah).....	89
Lampiran 3. Distribusi PDRB D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2015-2019 (persen).....	90
Lampiran 4. Tingkat Pertumbuhan PDRB D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha, 2015-2019 (persen).....	91
Lampiran 5. PDRB D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Juta Rupiah)	92
Lampiran 6. PDRB D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Juta Rupiah)	92
Lampiran 7. Distribusi PDRB D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2015-2019 (persen)	93
Lampiran 8. Distribusi PDRB D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2015-2019 (persen).....	93
Lampiran 9. PMTB + Perubahan Inventori, ICOR, dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa, 2019..	94
Lampiran 10. PDRB Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Berlaku, 2015-2019 (juta rupiah).....	94
Lampiran 11. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta, 2015-2019 (persen).....	95
Lampiran 12. PDRB Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha se-D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2019 (juta rupiah)	96
Lampiran 13. Kontribusi Lapangan Usaha Dominan menurut Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta, 2015-2019 (persen).....	97

BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam setiap perencanaan pembangunan, pemerintah daerah telah menentukan target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Salah satu faktor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah pertumbuhan investasi. Investasi yang bertumbuh akan meningkatkan kapasitas produksi yaitu kemampuan untuk memproses input dalam jumlah yang lebih banyak dan menghasilkan output yang lebih besar. Menurut Sutomo (2015), *investment is the engine of economic growth*, dengan pengertian bahwa faktor produksi yang berperan dalam menghasilkan output adalah investasi fisik (*ceteris paribus*). Pada perekonomian tertutup, dana investasi bersumber dari tabungan domestik, sedangkan pada perekonomian terbuka sumber dana dapat diperoleh melalui pinjaman dari luar wilayah.

Pemerintah D.I. Yogyakarta juga telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan investasi. Untuk mendorong investasi, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), Pemerintah D.I. Yogyakarta melakukan berbagai upaya agar tercipta iklim investasi yang kondusif. Salah satu indikator terciptanya iklim investasi yang kondusif adalah tingginya daya saing investasi, yang ditunjukkan dari tingkat efisiensi investasi. Indikator yang umum digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi investasi adalah *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Angka ICOR menunjukkan jumlah investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Besaran ICOR diperoleh dari perbandingan tambahan kapital dengan tambahan output. Jika angka ICOR bernilai negatif atau bernilai relatif besar akan dapat menunjukkan bahwa terjadi *inefficiency* dalam investasi. Kondisi investasi yang efisien akan terjadi pada angka ICOR yang nilainya relatif kecil. Namun demikian, untuk menilai tingkat efisiensi suatu investasi juga mempertimbangkan karakteristik

perekonomian suatu wilayah apakah bersifat *capital intensive* atau *labour intensive*.

Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Informasi mengenai potensi investasi dan iklim investasi daerah, sangat diperlukan investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi. Angka ICOR dapat digunakan untuk melihat keterkaitan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang mencerminkan besarnya produktivitas kapital untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Kajian mengenai ICOR menjadi sangat penting dan menarik untuk mendorong peningkatan investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kajian tersebut diharapkan dapat mengetahui penyebab tingginya angka ICOR, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam rangka mendorong investasi yang akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.

Semakin tinggi angka ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal. Efisiensi terjadi akibat adanya perbaikan teknologi, sehingga semakin rendah ICOR maka penggunaan modal semakin efisien dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 1988). Widodo (1990) menyatakan bahwa, produktivitas investasi dapat dikatakan baik apabila nilai ICOR berada pada kisaran 3 - 4.

Selama lima tahun terakhir, kondisi perekonomian D.I. Yogyakarta menunjukkan perkembangan yang semakin membaik, tercermin dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang semakin meningkat. Seiring dengan peningkatan PDRB, pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 tingkat pertumbuhan ekonomi D.I Yogyakarta sebesar 4,95 persen. Hal ini berarti menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa selama tahun 2015 sebesar 4,95 persen. Ekonomi yang terus bertumbuh ini berlangsung hingga tahun 2019 dimana pertumbuhannya mencapai 6,60 persen.

1.2. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
- j. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 008 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola;
- k. Peraturan Kepala BPS Nomor 43 Tahun 2017 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2018;
- l. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- m. Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun 2020;
- n. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Ruang Lingkup

1.3.1. Lingkup Materi

Lingkup kegiatan Analisis ICOR Sektoral D.I. Yogyakarta 2015-2019 meliputi:

- a. ICOR sektoral D.I. Yogyakarta dan ICOR agregat kabupaten/kota.
- b. Tahun data aktual 2015-2019 dan data proyeksi 2020-2022.

1.3.2. Lingkup Wilayah

Penyusunan ICOR Sektoral mencakup seluruh wilayah DIY.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Analisis ICOR Sektoral D.I. Yogyakarta 2015-2019 adalah untuk menyediakan kajian kebutuhan dan alokasi investasi menurut

wilayah maupun menurut sektor sehingga bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan D.I. Yogyakarta.

1.4.2. Tujuan

Tujuan pekerjaan Analisis ICOR Sektoral D.I. Yogyakarta 2015-2019, antara lain untuk:

- a. Menghitung tingkat investasi fisik untuk level provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Menyediakan angka ICOR sektoral level provinsi dan ICOR agregat kabupaten/kota;
- c. Menyediakan hasil analisis deskriptif ICOR sektoral level provinsi dan ICOR agregat kabupaten/kota;
- d. Memperkirakan kebutuhan tambahan investasi baru berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi level provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Menyediakan rekomendasi sebagai bahan kebijakan dan perencanaan bidang investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di level provinsi dan kabupaten/kota.

1.5. Sasaran dan Keluaran

1.5.1. Sasaran

Tersusunnya dokumen Analisis ICOR Sektoral D.I. Yogyakarta 2015-2019.

1.5.2. Keluaran

Dokumen hasil Analisis ICOR Sektoral D.I. Yogyakarta 2015-2019 yang mencakup:

- a. Perhitungan tingkat investasi fisik untuk level provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Angka ICOR sektoral level provinsi dan ICOR agregat kabupaten/kota;
- c. Hasil analisis ICOR sektoral level provinsi dan ICOR agregat kabupaten/kota;
- d. Perkiraan kebutuhan tambahan investasi baru berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi level provinsi;
- e. Rekomendasi sebagai bahan kebijakan bidang investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

1.6. Pembiayaan

Sumber dana pelaksanaan pekerjaan Analisis ICOR Sektoral D.I. Yogyakarta 2015-2019 dibebankan pada APBD D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian ICOR

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan suatu angka indikator yang menunjukkan besarnya tambahan kapital yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Nilai ICOR diperoleh dari perbandingan antara besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Pada umumnya, satuan jenis unit kapital bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara satuan jenis unit output relatif sama sehingga untuk memudahkan penghitungan maka keduanya dinilai secara nominal dengan satuan rupiah. ICOR dapat merefleksikan besarnya produktivitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Penambahan kapital sendiri diperoleh dari investasi.

ICOR memiliki peranan yang penting dalam teori ekonomi. ICOR atau rasio kenaikan output akibat kenaikan kapital adalah indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk menilai kinerja investasi di suatu negara. Selain itu, ICOR bisa digunakan untuk menghitung besarnya investasi yang dibutuhkan agar perekonomian tumbuh dengan besaran laju pertumbuhan yang sudah ditetapkan.

Hubungan ICOR dengan pertumbuhan ekonomi dikembangkan pertama kali oleh R.F. Harrod dan Evsey Domar. Profesor Evsey Domar, seorang ekonom Amerika Serikat, mengembangkan suatu koefisien yang diturunkan dari suatu rumus tentang pertumbuhan ekonomi. Domar mengemukakan teorinya tersebut pertama kali pada tahun 1947 dalam *American Economic Review*, sedangkan Harrod telah mengemukakannya pada tahun 1939 dalam *Economic Journal*. Teori ini sebenarnya dikembangkan oleh kedua ekonom secara sendiri-sendiri, tetapi karena inti teori tersebut sama, maka sekarang dikenal sebagai teori Harrod-Domar (Arsyad, 1988). Koefisien itu mengaitkan pertambahan kapasitas terpasang (*capital*) dengan pertumbuhan ekonomi (*output*).

Ada beberapa asumsi dalam Teori Harrod-Domar, yaitu:

- a. Perekonomian dalam pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dengan demikian dalam teori ini sektor pemerintah dan sektor luar negeri analisis dianggap tidak ada.
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, sehingga fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- d. Kecenderungan masyarakat untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap. Demikian pula dengan rasio antara modal – output (*capital output ratio = COR*) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital output ratio = ICOR*) (Arsyad, 1988).

Dalam model pertumbuhan Harrod-Domar mencakup persamaan sebagai berikut (Hess and Ross, 1997):

$$\begin{aligned}
 \text{H1) } K &= vY && \dots\dots\dots (2.1) \\
 \text{H2) } L &= uY && \dots\dots\dots (2.2) \\
 \text{H3) } I &= S && \dots\dots\dots (2.3) \\
 \text{H4) } S &= sY && \dots\dots\dots (2.4) \\
 \text{H5) } \Delta L/L &= n && \dots\dots\dots (2.5)
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Persamaan (2.1) dan (2.2) dapat dirumuskan persamaan fungsi produksi sebagai berikut:

$$Y = A \min (K/v, L/u) \dots\dots\dots (2.6)$$

keterangan:

- | | |
|-------------------------|--|
| Y = Output | S = Jumlah tabungan |
| A = Teknologi | v = Rasio kapital terhadap output |
| K = Stok kapital | u = Rasio tenaga kerja terhadap output |
| L = Jumlah tenaga kerja | s = Tingkat tabungan |
| I = Investasi | n = Tingkat pertumbuhan tenaga kerja alami |

Dengan asumsi $A = 1$, maka untuk memperoleh perubahan output sebesar ΔY diperlukan perubahan input sebagai berikut:

$$H1') \quad \Delta K = v\Delta Y \quad \dots\dots\dots (2.7)$$

$$H2') \quad \Delta L = u\Delta Y \quad \dots\dots\dots (2.8)$$

Dengan membagi persamaan (2.7) dengan (2.1) dan persamaan (2.8) dengan (2.2) akan diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\Delta K/K = v\Delta Y/vY = \Delta Y/Y \quad \dots\dots\dots (2.9)$$

$$\Delta L/L = u\Delta Y/uY = \Delta Y/Y \quad \dots\dots\dots (2.10)$$

keterangan:

- $\Delta Y/Y$ = laju pertumbuhan output
- $\Delta K/K$ = laju pertumbuhan kapital
- $\Delta L/L$ = laju pertumbuhan tenaga kerja

Dalam perekonomian sederhana tanpa campur tangan pemerintah dan perdagangan luar negeri serta pada kondisi keseimbangan pasar barang maka $I = S$. Tabungan diperoleh dari output yang tidak dikonsumsi. Dengan demikian, investasi adalah bagian output yang tidak dikonsumsi.

Dari Persamaan (2.3), (2.4), dan (2.7) dapat diperoleh persamaan:

$$\Delta K = I = S = sY \quad \dots\dots\dots (2.11)$$

$$v\Delta Y = \Delta K = I = S = sY \quad \dots\dots\dots (2.12)$$

$$v\Delta Y = sY \quad \dots\dots\dots (2.13)$$

$$v\Delta Y = vY = sY/vY \quad \dots\dots\dots (2.14)$$

$$\Delta Y/Y = s/v \quad \dots\dots\dots (2.15)$$

Meskipun demikian Teori Harrod-Domar tersebut mempunyai kelemahan, yaitu:

- a. Anggapan bahwa MPS dan ICOR adalah konstan merupakan anggapan yang terlalu kaku karena dalam jangka panjang ada kemungkinan ke dua variabel tersebut dapat berubah.

- b. Teori Harrod-Domar beranggapan bahwa proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tetap. Anggapan ini tidak dapat dipertahankan mengingat pada kenyataannya hubungan antara tenaga kerja dan modal tidak selalu dalam proporsi yang tetap.
- c. Model Harrod-Domar mengabaikan perubahan-perubahan harga pada umumnya, sementara perubahan harga selalu terjadi di setiap waktu dan sebaliknya dapat mengendalikan situasi ekonomi yang tidak stabil.
- d. Asumsi bahwa suku bunga tidak berubah adalah tidak relevan dengan analisis yang bersangkutan. Suku bunga dapat berubah dan pada akhirnya akan mempengaruhi investasi.

Pada dasarnya teori tentang ICOR dilandasi oleh dua macam konsep yaitu:

- a. Rasio Modal – Output atau Capital Output Ratio (COR) atau sering disebut sebagai *Average Capital Output Ratio* (ACOR), yaitu perbandingan antara modal yang digunakan dengan output yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. COR atau ACOR ini bersifat statis karena hanya menunjukkan besaran yang menggambarkan perbandingan modal dan output.
- b. Rasio Modal – Output Marginal atau *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR), yaitu suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan modal (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output baik secara fisik maupun secara nilai (uang). Konsep ICOR ini lebih bersifat dinamis karena menunjukkan perubahan/penambahan output sebagai akibat langsung dari penambahan modal.

Dari pengertian pada butir (ii), maka ICOR bisa diformulasikan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} \dots\dots\dots (2.16)$$

keterangan:

- ΔK = Investasi atau penambahan barang modal baru/kapasitas
- ΔY = Penambahan output

Contoh:

Diketahui bahwa ICOR di suatu daerah adalah sebesar 5. Hal ini berarti untuk meningkatkan output satu unit diperlukan investasi sebesar 5 unit. Jika output di daerah itu pada tahun sebelumnya sebesar 4 miliar rupiah, maka agar output pada tahun yang akan datang tumbuh 10 persen, atau bertambah sebesar 0,4 miliar rupiah, dibutuhkan investasi sebesar: $5 \times \text{Rp. } 0,4 \text{ miliar} = \text{Rp. } 2 \text{ miliar}$.

Dalam perkembangannya, data yang digunakan untuk menghitung ICOR bukan lagi hanya penambahan barang modal baru atau perubahan stok kapital, melainkan Investasi (I) yang ditanam baik oleh swasta maupun pemerintah sehingga rumusan ICOR dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y} \dots\dots\dots (2.17)$$

keterangan:

I = Investasi

ΔY = Perubahan output

Peningkatan output tidak hanya disebabkan oleh investasi tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi, seperti: pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi, dan kemampuan kewiraswastaan. Dengan demikian, untuk melihat peranan investasi terhadap output berdasarkan konsep ICOR, maka peranan faktor-faktor selain investasi diasumsikan konstan (*ceteris paribus*).

2.2. Pengertian Investasi

Untuk menghasilkan output, selain membutuhkan bahan baku dan tenaga kerja juga diperlukan barang modal atau investasi yang digunakan dalam proses produksi. Penggunaan investasi diharapkan dapat menambah stok kapital dan pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya membuat output dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Dalam jangka

panjang akumulasi investasi dapat mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah/negara.

Pemahaman kondisi tersebut memberikan pengertian pentingnya informasi investasi. Berdasarkan *System of National Accounts* (SNA), besarnya investasi yang direalisasikan di suatu wilayah/negara pada suatu tahun tertentu adalah sama dengan jumlah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditambah perubahan inventori/stok. SNA adalah buku panduan yang diterbitkan oleh *United Nations* (PBB) mengenai penyusunan neraca nasional. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada suatu tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang modal, seperti: bangunan, mesin-mesin, alat-alat transportasi, dan barang modal lainnya; sedangkan inventori/stok meliputi output setengah jadi, atau input yang belum digunakan, termasuk juga barang jadi yang belum dijual. Inventori atau stok termasuk dalam modal kerja yang merupakan bagian investasi yang direncanakan. Perubahan inventori merupakan selisih antara stok akhir dengan stok awal pada suatu periode tertentu.

Investasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: fisik, finansial, dan sumber daya manusia (SDM). Investasi yang berwujud fisik dapat berupa: jalan, jembatan, gedung, kantor, mesin-mesin, mobil dan sebagainya. Investasi finansial dapat berupa: pembelian surat berharga, pembayaran premi asuransi, penyertaan modal dan investasi keuangan lainnya. Sementara investasi SDM dapat berupa pendidikan dan pelatihan. Dalam kajian ini, pembahasan lebih ditekankan pada investasi fisik.

Konsep investasi yang digunakan dalam penghitungan ICOR mengacu pada konsep ekonomi nasional. Pengertian investasi adalah pembentukan barang modal tetap (*fixed capital formation*) yang terdiri dari: tanah, gedung/konstruksi, mesin dan perlengkapannya, kendaraan, dan barang modal lainnya. Sementara itu, nilai pembentukan modal mencakup:

- a. Pembelian barang baru dan barang bekas dari luar negeri,
- b. Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan pihak lain,
- c. Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan sendiri,

- d. Penjualan barang modal bekas.

Total nilai investasi diperoleh dari penjumlahan seluruh pembelian barang modal baru/bekas, pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan oleh pihak lain dan sendiri dikurangi penjualan barang modal bekas.

2.2.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sementara pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun dan akan mengalami penyusutan selama masa pemakaian atau yang dikenal sebagai usia pakai barang modal. Istilah “bruto” mengindikasikan bahwa di dalam barang modal tersebut masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode. Secara lebih rinci PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;

- b. Biaya alih kepemilikan aset nonfinansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

Selanjutnya PMTB dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu menurut jenis barang modal, lapangan usaha, dan institusi. Masing-masing jenis barang modal menurut klasifikasinya akan diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan di bawah ini.

- a. PMTB menurut jenis barang modal, dapat dibedakan menjadi:
 - 1) Pembentukan modal berupa bangunan, yaitu: bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, dan bangunan lainnya seperti: jalan raya, instalasi listrik, jaringan komunikasi, bendungan, pelabuhan, dan sebagainya.
 - 2) Pembentukan modal berupa mesin, seperti: mesin pertanian, mesin pertambangan, mesin industri, dan alat perabot serta perlengkapan untuk kantor, hotel, dan restoran.
 - 3) Pembentukan modal berupa alat angkutan seperti: mobil, bus, truk, kapal laut, pesawat, sepeda motor, dan sebagainya.

[Keterangan: yang dimaksud dalam PMTB adalah barang-barang modal yang digunakan untuk keperluan pabrik, kantor maupun usaha rumah tangga, tetapi tidak termasuk yang digunakan untuk konsumsi (*durable goods*)].

 - 4) Barang modal lainnya seperti: perluasan hutan; pengembangan/perluasan lahan; penanaman kembali hutan; ternak untuk pembiakan, pemerahan susu atau sebagai alat angkutan; perluasan areal pertambangan; dan sebagainya.

- b. PMTB menurut lapangan usaha:
- 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan
 - 2) Pertambangan dan penggalian
 - 3) Industri pengolahan
 - 4) Pengadaan listrik dan gas
 - 5) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
 - 6) Konstruksi
 - 7) Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor
 - 8) Transportasi dan pergudangan
 - 9) Penyediaan akomodasi dan makan minum
 - 10) Informasi dan komunikasi
 - 11) Jasa keuangan dan asuransi
 - 12) *Real Estate*
 - 13) Jasa perusahaan
 - 14) Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib
 - 15) Jasa pendidikan
 - 16) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
 - 17) Jasa lainnya
- c. PMTB menurut institusi dibedakan atas tiga kelompok berikut:
- 1) Pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah yang menyelenggarakan *general administration*, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengeluaran PMTB oleh pemerintah misalnya untuk membangun gedung kantor, pembelian mesin-mesin, komputer untuk menyelenggarakan tugas pemerintah sebagai *administration*, termasuk juga biaya untuk kepentingan masyarakat yang bersifat infrastruktur, seperti: jalan raya, pembangunan irigasi, dan sebagainya.
 - 2) Korporasi/Perusahaan Swasta termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam kategori ini hanya pengeluaran investasi yang benar-benar dikuasai BUMN/BUMD, tetapi tidak termasuk pengeluaran biaya oleh pemerintah pada butir a. di

atas. Kegiatan yang dicakup perusahaan meliputi sektor finansial dan nonfinansial.

- 3) Rumah tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba. Kegiatan membangun rumah baru atau memperbaiki rumah milik sendiri secara besar-besaran dianggap sebagai bagian dari pembentukan modal. Hal ini sesuai dengan keharusan meng-imputasi sewa rumah penduduk (rumah tangga) baik milik sendiri maupun rumah dinas.

2.2.2. Perubahan Inventori

Komponen Perubahan Inventori dalam PDRB merupakan bagian dari PMTB (investasi fisik) yang terjadi pada kurun waktu tertentu dalam suatu wilayah. Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain (barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong), yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Selain itu, perubahan inventori dapat menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang, sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;

- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material and supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2.3. Pengertian Output

Output diartikan sebagai seluruh nilai produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh berbagai sektor produksi. Dengan kata lain, output merupakan “keluaran” atau hasil yang diperoleh dari pendayagunaan seluruh faktor produksi baik berbentuk barang atau jasa seperti: tanah, tenaga kerja, modal dan kewiraswastaan. Dari segi ekonomi nasional, output merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi domestik dalam suatu periode tertentu.

Dari segi perusahaan, output mencakup nilai barang (komoditi) jadi yang dihasilkan selama suatu periode tertentu ditambah nilai perubahan inventori/stok barang (komoditi) yang masih dalam proses. Output yang dimaksud adalah:

- a. Barang-barang yang dihasilkan.
- b. Tenaga listrik yang dijual.
- c. Selisih nilai stok setengah jadi.

Output ini dihitung atas dasar harga produsen, yaitu harga yang diterima oleh produsen pada tingkat transaksi pertama. Karena masih mengandung nilai penyusutan barang modal, output ini masih bersifat bruto. Untuk mendapatkan output neto atas harga pasar, output bruto atas harga pasar harus dikurangi dengan penyusutan barang modal.

Dalam pengertian ICOR, output adalah tambahan produk dari hasil kegiatan ekonomi dalam suatu periode atau nilai-nilai yang merupakan hasil pendayagunaan faktor-faktor produksi. Output ini merupakan seluruh nilai tambah atas dasar biaya faktor produksi yang dihasilkan dari seluruh kegiatan usaha. Seluruh output yang dihasilkan dinilai atas dasar harga produsen. Output juga merupakan nilai perolehan produsen atas kegiatan ekonomi produksinya.

2.4. Pengertian Nilai Tambah Bruto

Konsep Nilai Tambah Bruto berkaitan erat dengan konsep penghitungan output. Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah nilai seluruh balas jasa faktor produksi yang meliputi upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung (neto). Dengan kata lain, nilai tambah adalah suatu tambahan nilai pada nilai input antara yang digunakan dalam proses menghasilkan barang/jasa. Nilai input antara tersebut bertambah karena input antara tersebut telah mengalami proses produksi yang mengubahnya menjadi barang yang nilainya lebih tinggi. Sedangkan input antara mencakup nilai seluruh komoditi yang habis atau dianggap habis dalam suatu proses produksi, seperti: bahan baku, bahan bakar, pemakaian listrik, dan sebagainya. Barang yang digunakan sebagai alat dalam suatu proses produksi dan umurnya kurang dari setahun dan habis dipakai dimasukkan sebagai input antara (bukan barang modal).

Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga pasar dari suatu unit produksi adalah output bruto atas dasar harga produsen dikurangi input antara

atas dasar harga pasar. Karena keterbatasan data penyusutan barang modal dan pajak tak langsung, maka pendekatan nilai tambah bruto inilah yang dipakai untuk penghitungan ICOR ini.

2.5. Penelitian Terdahulu

Badan Pusat Statistik telah melakukan penghitungan ICOR Sektor Industri Pengolahan pada tahun 1983, 1993, dan 1994 dengan menggunakan hasil survei tahunan Industri Besar dan Sedang (IBS). Hasil penghitungan tahun 1983 dan 1993 tidak dipublikasikan dan baru hasil penghitungan tahun 1994 yang dipublikasikan. Penghitungan ICOR tahun 1983 menggunakan series data tahun 1975-1981; kemudian pada tahun 1993 menggunakan series data tahun 1985-1990; dan pada penghitungan tahun 1994 menggunakan series data tahun 1980-1990. Ketiga penghitungan ICOR tersebut dilakukan untuk klasifikasi jenis barang 2 dan 3 digit ISIC.

Sebelum tahun 1985, Survei Tahunan IBS mengalami lewat cacah sehingga terjadi *undercoverage* untuk jumlah perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, BPS telah melakukan *backcasting* terhadap jumlah perusahaan agar cakupannya lebih lengkap. Pada penghitungan ICOR kedua (periode 1985-1990) telah digunakan nilai output sektor industri yang di-*backcasting* sesuai dengan jumlah perusahaannya. Namun nilai investasi yang digunakan belum disesuaikan dengan cakupan yang lebih lengkap, sehingga nilai ICOR yang diperoleh relatif sangat rendah yang berkisar antara 1 sampai 2. Sebaliknya, pada penghitungan ICOR ketiga (periode 1980-1990) telah dilakukan *backcasting* terhadap nilai output dan investasi sehingga cakupan datanya sama, hal ini berpengaruh pada besaran ICOR yang dihasilkan relatif lebih baik.

Agar diperoleh satu nilai ICOR yang dapat mewakili suatu periode waktu untuk masing-masing klasifikasi industri digunakan penghitungan dengan rata-rata sederhana. Rumus yang digunakan pada penghitungan ICOR pertama dan kedua sebanyak 12 rumus standar. Sedangkan pada penghitungan ICOR sektor industri yang ketiga digunakan sebanyak 15 rumus standar yang juga digunakan pada penghitungan ICOR dalam publikasi ini. Sebagai pembanding, pada

penghitungan ICOR ketiga dilakukan pula penghitungan berdasarkan akumulasi investasi dengan lag 0 yang pada dasarnya menerapkan prinsip rata-rata tertimbang. Selain itu pada penghitungan ICOR ketiga ini juga dilakukan penghitungan ICOR yang memperhitungkan selisih stok bahan baku, barang jadi, dan barang setengah jadi.

Pada penghitungan ICOR yang pertama dan kedua digunakan nilai output dan nilai investasi sektor industri pengolahan sebagai data dasar. Namun pada penghitungan ICOR ketiga digunakan nilai tambah sebagai proksi dari variabel output, dan *gross fixed capital formation* (pembentukan modal tetap bruto) sebagai proksi dari variabel investasi. Penggunaan variabel nilai tambah bruto sebagai proksi dari output dilakukan untuk menghindari *double counting*, karena output suatu kegiatan bisa merupakan input dari kegiatan lainnya. Nilai tambah yang digunakan dalam penghitungan ini adalah seluruh nilai output yang telah dikurangi dengan seluruh input/biaya antara. Selanjutnya, komponen nilai tambah yang bukan merupakan hasil pendayagunaan barang modal dikeluarkan dari seluruh nilai tambah. Data sektor industri pengolahan skala besar dan sedang yang digunakan dalam penghitungan ICOR ini merupakan data menurut harga berlaku sehingga masih terpengaruh oleh inflasi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data/nilai menurut harga konstan digunakan suatu indeks sebagai deflator.

Pada penghitungan ICOR pertama digunakan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) sebagai deflator untuk nilai output pada masing-masing kode industri. Sementara deflator untuk nilai investasi pada penghitungan ICOR pertama adalah IHPB barang-barang modal yang dihitung berdasarkan data yang dikumpulkan melalui Survei Khusus Barang Modal. Pada penghitungan ICOR kedua dan ketiga, *deflator* yang digunakan untuk nilai output masih sama dengan penghitungan ICOR pertama, yaitu dengan menggunakan IHPB untuk masing-masing kode ISIC industri. Sedangkan *deflator* untuk investasi adalah rata-rata tertimbang IHPB dari kode ISIC 382 (industri mesin bukan mesin listrik), 383 (industri mesin listrik dan perlengkapannya), 384 (industri alat angkutan), dan 390 (industri lainnya) dengan penimbang output dari masing-masing kode di atas.

Sementara itu, penghitungan ICOR di D.I. Yogyakarta telah dilakukan 12 kali oleh BPS bekerja sama dengan Bappeda D.I. Yogyakarta. Penghitungan ICOR pertama kali dilakukan pada tahun 2003 dan setelah itu rutin dilakukan selama kurun waktu 2009-2019. Pada tahun 2003 penghitungan ICOR mencakup rentang waktu 1998-2002, sedangkan pada tahun 2009 mencakup rentang waktu 2004-2008, dan seterusnya hingga tahun 2020 mencakup rentang waktu 2015-2019. Metode yang digunakan dalam penghitungan ICOR adalah metode standar dan metode akumulasi. Variabel investasi direpresentasikan dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Perhitungan ICOR dilakukan dengan pendekatan investasi sama dengan PMTB dan memasukkan perubahan inventori, serta tanpa memperhitungkan perubahan inventori. Penyusunan ICOR sektoral tahun 2003-2015 mengacu pada klasifikasi PDRB yang terdiri dari 9 (sembilan) sektor ekonomi. Pada tahun 2003, penghitungan ICOR menggunakan data PDRB tahun dasar 1993 dan pada penghitungan ICOR sektoral tahun 2009-2015 menggunakan data PDRB tahun dasar 2000. Mulai tahun 2016 data dasar untuk penghitungan ICOR menggunakan data PDRB tahun dasar 2010 dengan klasifikasi 17 kategori lapangan usaha.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan lapangan usaha di D.I. Yogyakarta konsisten mempunyai koefisien ICOR rendah dan beberapa konsisten tinggi. Lapangan usaha yang mempunyai koefisien ICOR rendah adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; dan jasa keuangan dan asuransi. Sementara itu lapangan usaha pengadaan listrik dan gas serta transportasi dan pergudangan merupakan lapangan usaha dengan koefisien yang relatif tinggi dibandingkan yang lapangan usaha lain. Hasil kajian ICOR sektoral tahun 2019 menunjukkan besaran ICOR yang fluktuatif selama kurun waktu 2014-2018. Selama kurun waktu tersebut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; jasa keuangan dan asuransi; serta *real estate* mempunyai ICOR yang relatif kecil dibandingkan lapangan usaha lainnya dengan nilai ICOR di bawah 4. Sebaliknya, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan memiliki ICOR yang lebih tinggi. Kondisi tersebut hampir sama dengan hasil kajian tahun 2018 (data tahun 2013-2017).

BAB III METODOLOGI



BAB III METODOLOGI

3.1. Sumber Data

Dalam penyusunan ICOR sektoral D.I. Yogyakarta 2015-2019, data yang digunakan bersumber dari hasil sensus dan survei-survei yang dilakukan oleh BPS. Data tersebut antara lain: Sensus Ekonomi 2016, Survei Tahunan Industri Besar/Sedang, Survei Tahunan Perusahaan Air Minum, Survei Tahunan Konstruksi, Survei Khusus Pendapatan Regional, Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga, Survei Angkatan Kerja Nasional, serta survei lainnya yang relevan. Selain itu, digunakan juga data dari penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik menurut lapangan usaha (*by industry*) maupun menurut pengeluaran (*by expenditure*). Penyusunan ICOR sektoral D.I. Yogyakarta 2015-2019 menggunakan data PDRB dengan tahun dasar 2010. Pemanfaatan hasil sensus dan survei ini dilakukan karena penghitungan ICOR memerlukan sumber dan cakupan data yang cukup luas. Sebagai referensi, digunakan juga sumber data sekunder yang diperoleh dari Bappeda Bidang Investasi/Badan Kerja sama dan Penanaman Modal Daerah (BKPM) berupa data investasi PMA/PMDN yang disetujui maupun realisasi, dan Bank Indonesia Yogyakarta berupa data kredit investasi.

3.2. Estimasi PMTB menurut Lapangan Usaha

PMTB dihitung atas dasar harga konstan 2010 karena pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Penghitungan PMTB menurut lapangan usaha menggunakan metode alokasi. Sebagai alokator adalah nilai penyusutan masing-masing sektor yang diperoleh pada penghitungan PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan total investasi dihitung dari jumlah PDRB yang digunakan untuk pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori.

Nilai penyusutan digunakan sebagai alokator berdasarkan pada pemikiran bahwa penyusutan barang modal tetap yang terjadi pada tahun tertentu akan

dipakai untuk investasi pada tahun itu juga. Ini berarti bahwa investasi mempunyai hubungan linier dengan nilai penyusutan sehingga lapangan usaha yang mempunyai nilai penyusutan besar akan memiliki investasi yang besar pula.

3.3. Penghitungan Pertambahan Output menurut Lapangan Usaha

Penghitungan pertambahan output (ΔY) didekati dengan pertambahan Nilai Tambah Bruto (ΔNTB) menurut lapangan usaha. Sebagai contoh, peningkatan output pertanian tahun 2019 didekati dengan pengurangan nilai tambah pertanian pada tahun 2019 atas dasar harga konstan dengan nilai tambah pertanian pada tahun 2018 atas dasar harga konstan. Dengan perlakuan yang sama, pertambahan output menurut lapangan usaha dihitung sebagai pertambahan NTB menurut lapangan usaha.

Pendekatan di atas dilakukan karena data NTB tersedia dengan *time series* yang cukup panjang diturunkan dari penghitungan PDRB menurut lapangan usaha. Selain itu, untuk beberapa lapangan usaha yang outputnya berupa jasa, maka penghitungan nilai tambah akan lebih mudah dan lebih tepat.

3.4. Metode Penghitungan ICOR

Penghitungan ICOR menggunakan dua metode, yaitu metode standar dan metode akumulasi investasi. Untuk tujuan keterbandingan, pendekatan investasi menggunakan dua cara, yaitu investasi sama dengan PMTB dengan dan tanpa memperhitungkan Perubahan Inventori. Penghitungan ICOR periode 2015-2019 dibatasi hanya dengan menggunakan metode standar lag 0, lag 1, dan lag 2, sedangkan untuk metode akumulasi hanya lag 0 saja.

3.4.1. Metode Standar

Secara matematis rumus yang digunakan untuk menghitung ICOR adalah:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} \dots\dots\dots (3.1)$$

keterangan:

- ΔK = Investasi atau penambahan barang modal baru/kapasitas
 ΔY = Penambahan output

Dalam praktek, data yang diperoleh bukan penambahan barang modal baru atau penambahan kapasitas terpasang, melainkan besarnya realisasi nilai investasi yang ditanam baik oleh Pemerintah maupun Swasta. Sehingga dengan mengasumsikan $\Delta K = I$ (investasi), maka Rumus (3.1) dapat dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y} \dots\dots\dots (3.2)$$

Rumus (3.2) ini disebut dengan *Gross ICOR*, yaitu suatu rasio yang menunjukkan besarnya tambahan unit kapital yang diperlukan untuk memperoleh tambahan satu unit output pada suatu periode tertentu. Dalam penerapannya rumus *Gross ICOR* ini lebih sering dipakai karena data yang digunakan tersedia relatif lebih lengkap.

Dalam beberapa hal untuk kasus-kasus tertentu, investasi yang ditanamkan pada suatu tahun akan langsung menghasilkan tambahan output pada tahun itu juga, sehingga Rumus (3.2) di atas dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{I_t}{(Y_t - Y_{t-1})} \dots\dots\dots (3.3)$$

keterangan:

- I_t = Investasi pada tahun ke-t
 Y_t = Output pada tahun ke-t
 Y_{t-1} = Output pada tahun ke-1

Rumus (3.3) di atas dapat diartikan bahwa investasi yang ditanamkan pada tahun ke-t akan menimbulkan output pada tahun t itu juga.

Pada metode standar, langkah penghitungan dilakukan terlebih dahulu dengan mencari ICOR pada masing-masing tahun untuk periode waktu t_1 sampai t_n , sehingga akan didapatkan nilai ICOR sebanyak n buah. ICOR yang dianggap dapat mewakili untuk periode waktu tersebut (t_1 s.d t_n) diperoleh dengan jalan membagi antara jumlah nilai ICOR selama periode waktu t_1 s.d t_n dengan jumlah tahun (n), atau dengan mencari rata-rata nilai ICOR selama periode t_1 sampai dengan t_n .

Prinsip dari penghitungan ICOR metode standar ini adalah rata-rata sederhana dan penulisannya secara matematis sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{1}{n} \sum \frac{I_t}{(Y_t - Y_{t-1})} \dots\dots\dots (3.4)$$

Kelemahan dari penggunaan rata-rata sederhana ini adalah jika terjadi suatu koefisien ICOR yang ekstrim pada tahun-tahun tertentu, maka koefisien ini berpengaruh pada nilai rata-rata koefisien ICOR dalam periode waktu penghitungan. Namun demikian, penggunaan metode standar ini mempunyai daya tarik lain, yaitu mampu mencerminkan *inefficiency* investasi yang sering terjadi dalam praktek.

3.4.2. Metode Akumulasi

Pendekatan penghitungan ICOR dengan metode akumulasi berdasarkan suatu anggapan bahwa timbulnya kenaikan output selama periode waktu referensi (t_1 s.d. t_n) disebabkan karena adanya akumulasi investasi pada periode yang sama.

Perumusan ICOR dengan metode ini adalah rasio antara akumulasi investasi terhadap akumulasi peningkatan output selama periode waktu t_1 sampai t_n yang secara matematis dituliskan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\sum I_t}{\sum (Y_t - Y_{t-1})} \dots\dots\dots (3.5)$$

Kelebihan dari metode akumulasi adalah sudah terkandung prinsip rata-rata tertimbang dalam penerapannya. Dengan digunakannya rata-rata tertimbang, maka koefisien ICOR ekstrim yang terjadi pada tahun-tahun tertentu bisa dihindari. Tetapi, metode akumulasi ini tidak memperhitungkan kapasitas terpasang yang berlebih dan tidak dimanfaatkan secara penuh. Dengan kata lain, metode akumulasi relatif kurang mampu mencerminkan *inefficiency*, yang memang terjadi dalam praktek.

3.4.3. Time Lag Investasi

Biasanya investasi yang ditanam pada tahun tertentu tidak secara langsung memberikan hasil tambahan output pada tahun itu juga, tetapi memerlukan waktu beberapa tahun lagi. Rentang waktu yang diperlukan agar penanaman investasi dapat menghasilkan tambahan output disebut *time lag*, selanjutnya hanya akan dituliskan *lag* saja.

Jika investasi yang ditanam pada tahun ke-t baru menimbulkan kenaikan output setelah s tahun, maka rumus (3.4) di atas (ICOR metode standar) dengan adanya faktor *time lag* dapat dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{1}{n} \sum \frac{I_t}{(Y_{t+s} - Y_{t+s-1})} \dots\dots\dots (3.6)$$

keterangan:

Time lag = 0, 1, 2, 3, 4, ... dst

s = Lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil/output terhitung sejak penanaman investasi.

3.4.4. Koefisien ICOR Negatif

Koefisien ICOR negatif dapat terjadi jika output pada suatu waktu tertentu lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. Penurunan output terjadi jika ada sebagian barang modal dijual, rusak atau tidak diaktifkan karena alasan tertentu.

Walaupun mungkin ada penambahan barang modal baru, tetapi barang modal baru tersebut sementara belum memproduksi atau telah memproduksi tetapi output yang dihasilkan relatif sangat kecil dibandingkan dengan output tahun sebelumnya. Sehingga selisih output antara tahun ditanamkannya investasi dengan tahun sebelumnya bernilai negatif. Pada gilirannya koefisien ICOR menjadi negatif. Dengan demikian, penanaman barang modal baru belum menghasilkan output secara optimal, atau bisa dikatakan investasi yang ditanamkan belum/tidak efisien pada saat itu. Tetapi jika ada penambahan/penggantian barang modal, maka tidak bisa dikatakan bahwa telah terjadi *inefficiency*. Namun demikian secara makro keadaan yang disebutkan terakhir ini jarang terjadi.

3.4.5. Koefisien ICOR Positif dan Besar Serta Koefisien ICOR Negatif dan Besar

Koefisien ICOR yang relatif besar terjadi jika nilai investasi yang ditanamkan pada tahun tertentu relatif besar, sedangkan output yang dihasilkan sedikit lebih besar atau hampir sama dengan output pada tahun sebelumnya, atau tambahan output yang dihasilkan relatif kecil. Koefisien ICOR yang besar juga bisa terjadi pada lapangan usaha yang bersifat *capital intensive*.

Koefisien ICOR negatif dan besar memiliki makna yang sama dengan koefisien ICOR positif dan besar. Koefisien ICOR negatif dan besar mengandung arti bahwa investasi yang ditanamkan tidak segera produktif.

3.4.6. Asumsi Dasar

Walaupun pertambahan output sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi, dalam penghitungan ICOR ini digunakan asumsi bahwa tidak ada faktor lain yang mempengaruhi output selain investasi, dengan kata lain faktor-faktor lain di luar investasi dianggap konstan (*ceteris paribus*). Jadi perubahan/kenaikan output hanya disebabkan oleh adanya perubahan kapital/investasi.

Output dari suatu kegiatan ekonomi merupakan input antara untuk kegiatan ekonomi lainnya, sehingga jika digunakan konsep output dalam penghitungan

ICOR dirasakan kurang tepat karena akan terjadi penghitungan ganda (*double counting*), yaitu output dari suatu perusahaan akan dihitung kembali sebagai input perusahaan lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam penghitungan ICOR digunakan konsep nilai tambah.

Konsep nilai tambah (*value added*) yang digunakan dalam penghitungan ICOR ini selanjutnya dinamakan dengan istilah ICVAR (*Incremental Capital Value Added Ratio*). Meskipun demikian, ukuran ICVAR ini juga digunakan untuk memprediksi suatu rasio investasi terhadap output menurut lapangan usaha, dan bukannya terhadap nilai tambah semata.

ICOR yang disajikan telah memperhitungkan perubahan inventori (selisih stok) baik bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Dalam pendekatan mikro, umumnya perusahaan diasumsikan tidak melakukan penimbunan atau akumulasi stok barang untuk kelancaran produksi. Dalam pendekatan makro, perusahaan dianggap telah membuat keputusan akumulasi stok dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang akan datang. Misalnya, dalam hal ada kecenderungan bahan baku akan melonjak, perusahaan dapat mengambil keputusan melakukan akumulasi stok bahan baku dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi mendatang. Penghitungan ICOR di sini, menggunakan pendekatan makro, dengan menganggap perubahan inventori/stok sebagai bagian dari pembentukan modal (investasi).

Beberapa asumsi lainnya yang dipakai dalam penyusunan ICOR ini adalah:

1. Perubahan output semata-mata hanya disebabkan oleh perubahan kapital/adanya investasi.
2. Faktor-faktor lain di luar investasi, seperti pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi dan kemampuan wiraswasta diasumsikan konstan.

Dengan asumsi-asumsi di atas angka ICOR mempunyai keterbatasan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak mampu menjelaskan penyebab pertumbuhan ekonomi, apakah dipengaruhi oleh pertumbuhan faktor produksi atau tingkat produktivitasnya.

2. Tidak mampu menjelaskan besaran peranan faktor di luar perubahan kapital dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi.
3. Proses penghitungan ICOR yang optimal sebaiknya menggunakan periode referensi yang panjang misalnya 10 tahun ke atas, karena pembentukan modal bersifat akumulatif. Dalam kajian ini hanya dibatasi selama periode 2015-2019.

3.5. Indeks Perkembangan Agregat PDRB

Indeks Perkembangan Agregat PDRB menunjukkan tingkat perkembangan agregat PDRB dari tahun ke tahun dibandingkan dengan tahun dasarnya. Indeks ini diperoleh dengan membagi nilai PDRB menurut lapangan usaha pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun dasar, dikalikan 100. Indeks perkembangan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IP = \frac{PDRB_{it}}{PDRB_{i0}} \times 100\% \dots\dots\dots (3.7)$$

keterangan:

- IP* = Indeks Perkembangan
- i* = Lapangan Usaha (1, 2, ..., n)
- t* = Tahun t
- 0* = Tahun dasar

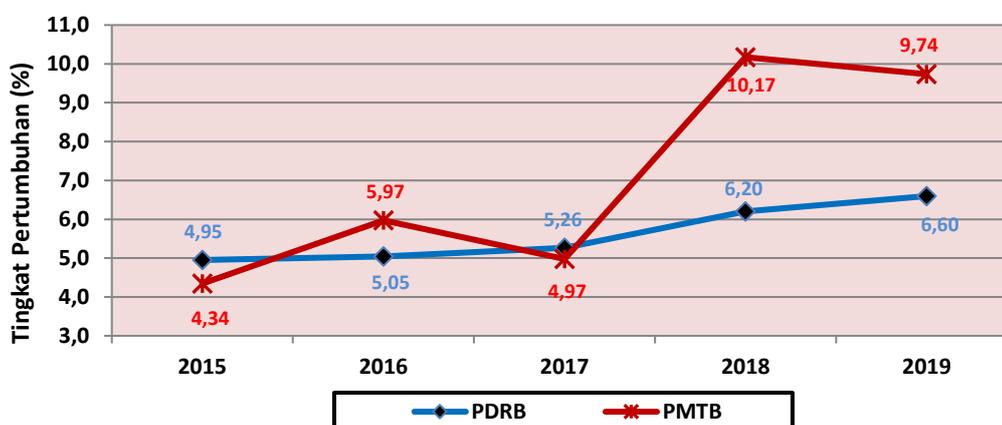
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian wilayah secara riil adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, biasanya triwulanan atau tahunan. Dalam analisis ini digunakan angka pertumbuhan tahunan.



Sumber: BPS Provinsi DIY

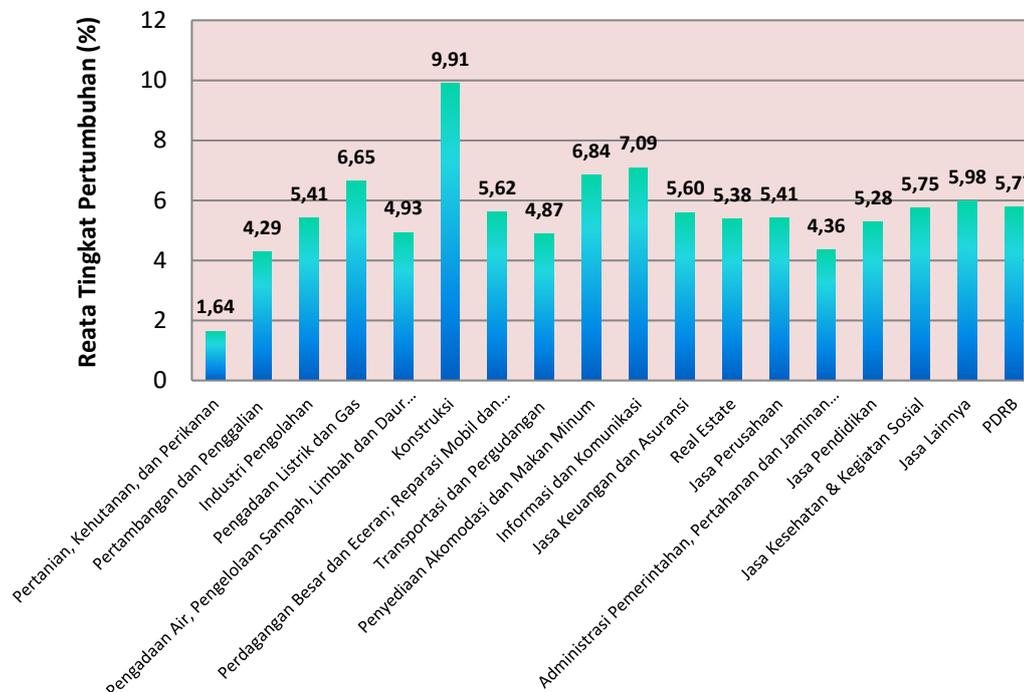
**Gambar 4.1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan PMTB
D.I. Yogyakarta, 2015-2019 (Persen)**

Selama periode 2015-2019 tingkat pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta cenderung meningkat. Pada tahun 2015 tingkat pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta sebesar 4,95 persen dan terus meningkat hingga mencapai 6,60 persen pada tahun 2019. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta mengalami akselerasi. Salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta selama periode ini adalah investasi fisik yang dicerminkan oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Pengeluaran. Seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi selama periode 2015-2019, investasi fisik juga mengalami peningkatan dengan rata-rata

pertumbuhan mencapai 7,69 persen per tahun. Rata-rata pertumbuhan PMTB yang cukup tinggi selama lima tahun terakhir didorong oleh pertumbuhan PMTB pada tahun 2018 dan 2019 yang meningkat tajam masing-masing mencapai sebesar 10,17 persen dan 9,74 persen. Pada tahun 2017 pertumbuhan PMTB hanya sebesar 4,97 persen. Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta yang mulai intensif dikerjakan pada pertengahan tahun 2018 dan hingga tahun 2019 ini memberikan dampak terhadap peningkatan PMTB D.I. Yogyakarta. Selain bandara, mega proyek lain yang diduga turut mendorong peningkatan PMTB adalah pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarta di Kulon Progo, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum-Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (SPAM-Kapet) Kulon Progo, dan juga pembangunan Jogja Agro Techno Park di Nanggulan Kulon Progo. Pembangunan *underpass* Bandara Internasional Yogyakarta yang merupakan *underpass* terpanjang di Indonesia dan juga pembangunan *underpass* Kentungan serta pembangunan gedung sekolah dan perkantoran, hotel, rumah sakit, dan perumahan di beberapa wilayah di D.I. Yogyakarta diduga juga mendorong peningkatan PMTB D.I. Yogyakarta.

Selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta meningkat dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun mencapai 5,77 persen. Lapangan usaha yang mempunyai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah konstruksi yaitu mencapai 9,91 persen. Masifnya kegiatan investasi fisik menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan pertumbuhan lapangan usaha konstruksi. Selanjutnya lapangan usaha yang mempunyai rata-rata pertumbuhan di atas 6 persen per tahun adalah informasi dan komunikasi (infokom), penyediaan akomodasi dan makan/minum, serta pengadaan listrik dan gas. Dari keempat lapangan usaha yang mempunyai pertumbuhan rata-rata di atas 6 persen tersebut, pengadaan listrik dan gas serta konstruksi merupakan kelompok lapangan usaha sekunder sedangkan dua lainnya termasuk dalam kelompok lapangan usaha tersier. Sebagian besar lapangan usaha yang termasuk dalam kelompok tersier mempunyai rata-rata pertumbuhan di atas 5 persen per tahun, kecuali transportasi (dan pergudangan) dan administrasi pemerintahan (pertahanan, dan jaminan sosial) yang rata-rata pertumbuhannya masing-masing 4,87 persen dan 4,36 persen per tahun.

Sementara itu rata-rata pertumbuhan terendah adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, hanya sebesar 1,64 persen per tahun.



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 4.2. Rata-rata Tingkat Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha, 2015-2019 (Persen)

Pada tahun 2019, seluruh lapangan usaha di D.I. Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang positif. Lapangan usaha konstruksi mengalami pertumbuhan yang cukup mencolok hingga mencapai angka dua digit, yaitu sebesar 14,39 persen. Selain konstruksi, ada empat lapangan usaha yang mempunyai pertumbuhan di atas 7 persen, yaitu pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa keuangan dan asuransi; dan informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada enam lapangan usaha yang mempunyai pertumbuhan sekitar 6 persen, yaitu jasa perusahaan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa pendidikan; dan jasa lainnya. Lima lapangan usaha mengalami pertumbuhan sekitar 5 persen, yaitu real estate; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Sementara itu empat lapangan usaha yang lain mempunyai pertumbuhan kurang dari 4 persen, yaitu

transportasi dan pergudangan; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; pertambangan dan penggalian; dan juga pertanian, kehutanan, dan perikanan.

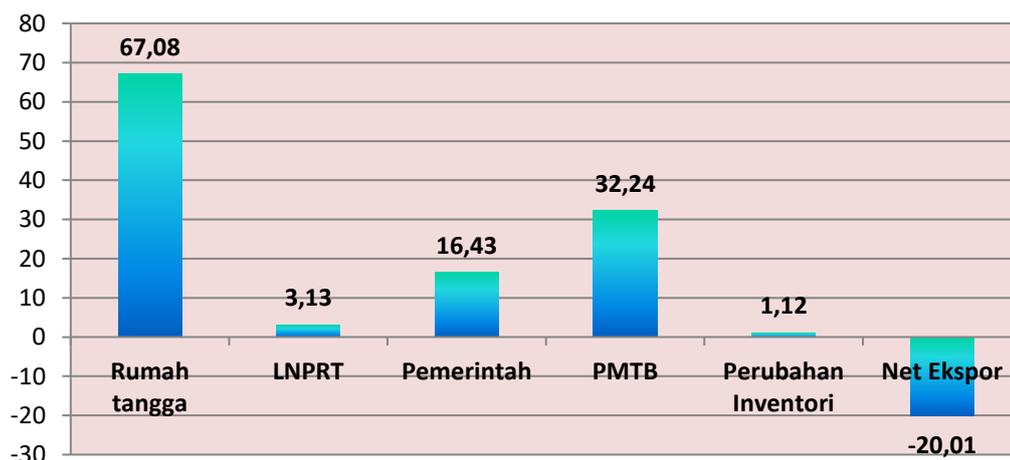
Tabel 4.1. Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha, 2015-2019 (Persen)

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,11	1,46	1,93	2,16	1,03
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	1,94	1,50	1,73	2,70	1,43
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,83	1,17	2,88	-2,42	0,17
c. Perikanan	4,21	1,40	4,25	0,80	-5,88
2. Pertambangan dan Penggalian	0,13	0,42	3,39	10,59	3,04
3. Industri Pengolahan	2,13	5,06	5,74	5,12	5,73
4. Pengadaan Listrik dan Gas	2,19	14,26	3,96	3,31	5,43
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,90	2,36	3,46	5,13	8,90
6. Konstruksi	4,24	5,42	7,01	13,10	14,39
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,19	6,07	5,72	5,54	5,16
8. Transportasi dan Pergudangan	3,73	4,60	4,76	6,60	3,55
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,77	5,51	6,21	6,77	8,89
a. Penyediaan Akomodasi	7,17	8,16	11,13	13,06	18,86
b. Penyediaan Makan Minum	5,46	4,91	5,06	5,21	6,24
10. Informasi dan Komunikasi	5,11	8,32	6,14	6,48	7,45
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,27	4,99	2,81	6,14	8,52
a. Jasa Perantara Keuangan	8,97	4,63	1,77	6,47	8,70
b. Lainnya	6,30	6,03	5,77	5,24	8,03
12. Real Estate	6,05	5,13	4,91	5,54	5,93
13. Jasa Perusahaan	7,31	3,49	5,92	5,51	6,75
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,57	5,57	4,51	4,06	3,30
15. Jasa Pendidikan	7,28	3,07	5,52	6,01	6,57
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,15	4,52	5,84	6,05	6,61
17. Jasa lainnya	8,00	5,70	5,76	6,19	6,25
PDRB	4,95	5,05	5,26	6,20	6,60

Sumber: BPS Provinsi DIY

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Peningkatan PMTB dari sisi pengeluaran yang disebabkan oleh aktivitas pembangunan beberapa mega proyek di wilayah D.I. Yogyakarta, gedung sekolah dan perkantoran, hotel, rumah sakit, dan perumahan akan memberi nilai tambah pada lapangan usaha konstruksi pada sisi produksi. Dengan demikian kenaikan lapangan usaha konstruksi yang cukup mencolok pada tahun 2019 ini merupakan dampak positif dari aktivitas pembangunan tersebut.



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 4.3. Rerata Distribusi PDRB D.I. Yogyakarta menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Persen)

Jika sebelumnya telah dibahas mengenai sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi dan juga sekilas dibahas kegiatan investasi fisik dari sisi pengeluaran maka selanjutnya akan dilihat pemanfaatan dari semua kegiatan ekonomi tersebut dari sisi pengeluaran. Ditinjau dari pemanfaatannya, hingga tahun 2019 sebagian besar PDRB yang dihasilkan di D.I. Yogyakarta digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga. Selama lima tahun terakhir rata-rata porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga per tahun di DIY sebesar 67,08 persen dari total PDRB. Kontribusi terbesar kedua dalam pemanfaatan PDRB adalah komponen PMTB yang mencapai 32,24 persen per tahun. Selanjutnya komponen konsumsi pemerintah mempunyai kontribusi terbesar ketiga dengan rata-rata sebesar 16,43 persen per tahun. Sementara untuk pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit dan perubahan inventori rata-rata kontribusinya per tahun masing-masing 3,13 persen dan 1,12 persen. Secara umum, selama lima tahun terakhir produksi domestik di wilayah D.I. Yogyakarta belum bisa

memenuhi total permintaan domestik sehingga komponen ekspor netto bernilai negatif, yaitu sebesar minus 20,01 persen per tahun atau nilai ekspor lebih kecil dibandingkan nilai impor (Gambar 4.3).

Nilai ekspor netto yang bertanda negatif dapat menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir D.I. Yogyakarta mengalami defisit neraca perdagangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa di wilayah D.I. Yogyakarta belum bisa digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat D.I. Yogyakarta. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang usaha bagi produsen domestik untuk memproduksi barang dan jasa yang masih harus diimpor dari daerah lain karena potensi pasar domestik relatif besar. Namun demikian, dalam pengembangan produk substitusi impor harus tetap memperhitungkan juga penguasaan teknologi dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan.

Tabel 4.2. Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**	Rata-rata 2015-2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,74	4,83	5,22	3,95	3,81	4,45
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	2,90	-0,92	9,61	2,63	9,58	5,12
3. Konsumsi Pemerintah	5,50	1,81	1,20	3,47	3,12	2,40
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,34	5,97	4,97	10,17	9,74	7,69
5. Perubahan Inventori	4,73	7,24	2,02	3,54	3,04	3,94
6. Ekspor Barang dan Jasa	4,71	4,50	6,06	1,21	2,45	3,54
7. Impor Barang dan Jasa	4,26	3,64	4,85	0,22	0,49	2,28
PDRB	4,95	5,05	5,26	6,20	6,60	5,77

Sumber: BPS Provinsi DIY

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Seperti sudah disebutkan diawal pembahasan, bahwa selama lima tahun terakhir komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah komponen investasi fisik, atau lazim disebut PMTB, dengan laju pertumbuhan rata-rata 7,69 persen per tahun. Rata-rata laju pertumbuhan yang tinggi dari komponen PMTB tersebut didorong oleh beberapa kegiatan mega proyek dan pembangunan gedung sekolah dan perkantoran, hotel, rumah sakit,

dan perumahan yang menyebabkan peningkatan yang cukup mencolok pada dua tahun terakhir. Jika pada tahun 2015-2017 laju pertumbuhan komponen PMTB berada pada level 4-5 persen, maka seiring dengan dimulainya mega proyek pembangunan baru pada tahun 2018 komponen PMTB meningkat mencolok hingga mencapai level 10,17 persen. Proses pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta yang masih berlanjut dan ditambah dengan beberapa mega proyek yang juga dilakukan pada tahun 2019 di wilayah D.I. Yogyakarta kembali menyebabkan tingginya pertumbuhan komponen PMTB meskipun sedikit melambat, yaitu 9,74 persen.

Selanjutnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2019 cenderung melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015-2017 laju pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga mencapai level 4-5 persen, namun pada tahun 2018-2019 laju pertumbuhannya melambat hingga pada level 3 persen. Komponen lain yang tumbuh di atas 3 persen adalah perubahan inventori dan konsumsi pemerintah. Meskipun sama-sama tumbuh di atas 3 persen akan tetapi andil pertumbuhan perubahan inventori terhadap perekonomian D.I. Yogyakarta relatif kecil, berbeda dengan konsumsi pemerintah yang memiliki kontribusi terbesar ketiga setelah konsumsi rumah tangga dan PMTB. Perubahan inventori merupakan gambaran selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi, Sementara itu konsumsi lembaga swasta nirlaba pada tahun 2019 kembali meningkat tajam mencapai 9,58 persen seiring berlangsungnya pesta demokrasi pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai salah satu lembaga non profit, kegiatan belanja partai politik selama masa kegiatan kampanye memberikan dampak yang cukup mencolok pada komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba. Di sisi lain, volume perdagangan antar wilayah menunjukkan peningkatan baik ekspor maupun impor. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan kegiatan ekspor dan impor kembali meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara kewilayahan, perekonomian D.I. Yogyakarta bisa dibandingkan dengan wilayah regional se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara atau yang disingkat dengan Jabalnusra. Wilayah Jabalnusra meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan

Nusa Tenggara Timur. DKI Jakarta memiliki luas wilayah yang paling kecil di antara provinsi lain di Jabalnusra meskipun begitu PDRB provinsi ini merupakan yang paling besar mengingat DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi di Indonesia. PDRB DKI Jakarta rata-rata menyumbang sebesar 17,51 persen per tahun dari total PDRB Indonesia, diikuti Jawa Timur dengan porsi 14,81 persen dan Jawa Barat sebesar 13,27 persen. Sementara itu D.I. Yogyakarta bersama Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat mempunyai andil di bawah 1 persen dalam perekonomian Indonesia. Proporsi rata-rata PDRB D.I. Yogyakarta selama lima tahun terakhir hanya sebesar 0,88 persen, sedangkan Nusa Tenggara Barat sebesar 0,89 persen dan Nusa Tenggara Timur sebesar 0,67 persen.

Tabel 4.3. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Jabalnusra, 2015-2019 (Persen)

Provinsi	2015	2016	2017	2018*	2019**	Rata-rata 2015-2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI Jakarta	5,91	5,87	6,20	6,17	5,89	6,03
Jawa Barat	5,05	5,66	5,33	5,66	5,07	5,43
Jawa Tengah	5,47	5,25	5,26	5,31	5,41	5,31
DIY	4,95	5,05	5,26	6,20	6,60	5,77
Jawa Timur	5,44	5,57	5,46	5,50	5,52	5,51
Banten	5,45	5,28	5,75	5,82	5,53	5,60
Bali	6,03	6,33	5,56	6,33	5,63	5,96
NTB	21,76	5,81	0,09	-4,46	4,01	1,28
NTT	4,92	5,12	5,11	5,13	5,20	5,14
Indonesia	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02	5,07

Sumber: BPS Provinsi DIY

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Sementara itu rata-rata laju pertumbuhan provinsi se-Jabalnusra selama lima tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan nasional, kecuali Nusa Tenggara Barat. Secara nasional, perekonomian tumbuh sebesar 5,07 persen per tahun sedangkan pertumbuhan ekonomi provinsi se-Jabalnusra berkisar antara 1,28 persen hingga 6,03 persen per tahun. DKI Jakarta mempunyai rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu mencapai 6,03 persen per tahun, diikuti Bali sebesar 5,96 persen per tahun dan D.I. Yogyakarta

sebesar 5,77 persen per tahun. Pergeseran posisi rata-rata pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta hingga termasuk dalam tiga besar se-Jabalnusra terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan dua tahun terakhir yang mencapai level 6 persen. Nusa Tenggara Barat memiliki rata-rata laju pertumbuhan terendah yaitu sebesar 1,28 persen per tahun. Pada tahun 2015 provinsi ini sempat tumbuh sangat tinggi hingga mencapai 21,76 persen, namun kemudian mengalami kontraksi 4,46 persen akibat bencana alam gempa bumi yang melanda sebagian wilayah di Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2018.

4.2. Perkembangan Nilai Investasi

Besarnya investasi dalam proses produksi ditentukan oleh produktivitas marginalnya. Produktivitas marginal adalah tambahan output yang diperoleh pada setiap tambahan satu unit kapital dalam proses produksi dengan faktor produksi yang lain konstan (*ceteris paribus*). Investasi akan dilakukan apabila produktivitas investasi masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga yang akan diterimanya seandainya modal itu dipinjamkan dan tidak diinvestasikan.

Tabel 4.4. Perkembangan Nilai Investasi D.I. Yogyakarta, 2015-2019 (Juta Rupiah)

Tahun	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	PMTB	Δ Inventori	Jumlah	PMTB	Δ Inventori	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
2015	30.798.881	1.151.797	31.950.678	22.286.615	974.645	23.261.260
2016	33.428.978	1.295.788	34.724.766	23.616.948	1.045.164	24.662.112
2017	37.111.436	1.368.184	38.479.620	24.791.862	1.066.314	25.858.176
2018*	43.173.678	1.435.491	44.609.170	27.313.862	1.104.088	28.417.951
2019**	49.519.128	1.501.126	51.020.254	29.973.484	1.137.665	31.111.149

Sumber: BPS Provinsi DIY

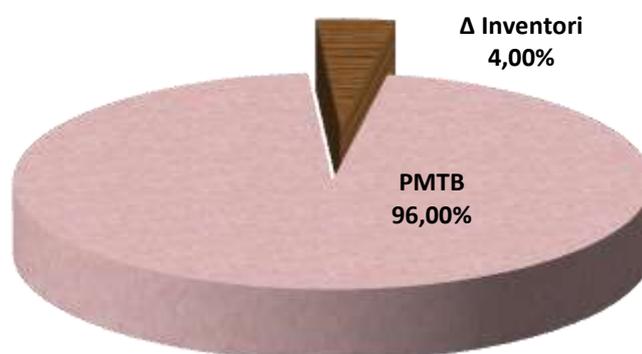
Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Dalam penyusunan ICOR D.I. Yogyakarta, konsep investasi mencakup komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan komponen Perubahan Inventori (Δ Inventori). Berdasarkan harga konstan 2010, perkembangan nilai

investasi D.I. Yogyakarta selama periode 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 nilai investasi atas dasar harga konstan mencapai 23,26 triliun rupiah, kemudian terus meningkat menjadi 31,11 triliun rupiah pada tahun 2019 (Tabel 4.4). Secara umum rata-rata pertumbuhan investasi D.I. Yogyakarta mencapai sebesar 7,54 persen per tahun selama periode 2015-2019.

4.3. Struktur Investasi

Berdasarkan *System of National Accounts* (SNA), nilai investasi merupakan penjumlahan dari PMTB dan perubahan inventori. Kegiatan PMTB tercermin dari investasi fisik domestik dalam bentuk berbagai jenis barang kapital, seperti: bangunan, mesin-mesin, kendaraan atau alat angkut, *cultivated biological resources*, dan peralatan lainnya. Sementara itu perubahan inventori merupakan selisih stok barang pada posisi akhir tahun dikurangi dengan posisi stok barang pada awal tahun. Sementara perubahan inventori mencakup stok dalam bentuk bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi.



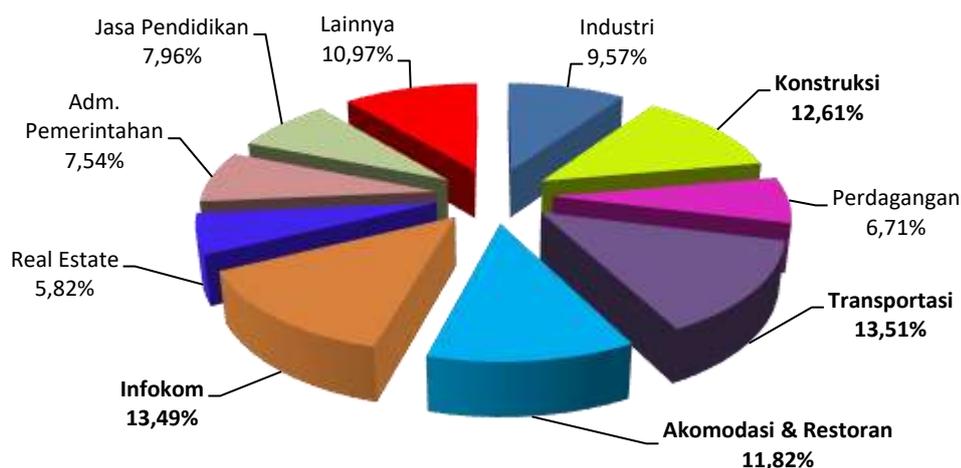
Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 4.4. Rerata Proporsi PMTB terhadap Total Investasi D.I. Yogyakarta, 2015-2019

Ditinjau dari unsur penyusunnya, sebagian besar nilai investasi didominasi oleh PMTB. Selama periode 2015-2019, rata-rata proporsi PMTB terhadap total investasi mencapai 96 persen sedangkan proporsi perubahan inventori hanya sebesar 4 persen (Gambar 4.4). Kondisi ini dapat diartikan sebagai suatu

keberhasilan dalam kegiatan ekonomi karena hampir seluruh dana investasi telah diwujudkan dalam bentuk investasi fisik dan hanya sebagian kecil yang masih berupa stok dalam bentuk bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi.

Selama lima tahun terakhir, struktur investasi D.I. Yogyakarta didominasi oleh aktivitas informasi dan komunikasi dengan kontribusi sebesar 13,49 persen per tahun. Lapangan usaha lain yang juga melakukan investasi yang cukup besar (dengan *share* diatas 10 persen) adalah transportasi dan pergudangan sebesar 13,51 persen; konstruksi sebesar 12,61 persen; serta akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 11,82 persen. Selanjutnya, lapangan usaha lain dengan kontribusi investasi rata-rata 6-10 persen per tahun adalah industri pengolahan, jasa pendidikan, administrasi pemerintah, dan perdagangan. Sementara investasi pada lapangan usaha *real estate* sebesar 5,82 persen.

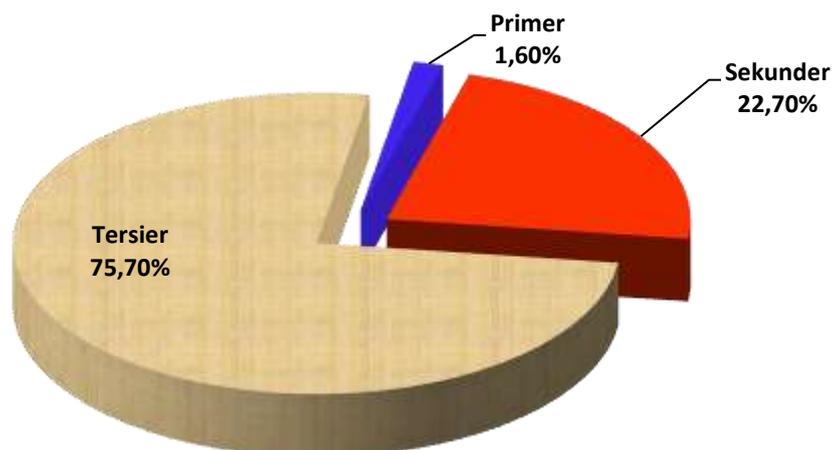


Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 4.5. Rerata Struktur Investasi D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha, 2015-2019

Selanjutnya, ditinjau menurut kelompok industri, rata-rata porsi investasi terbesar terjadi pada kelompok industri tersier yaitu 75,70 persen, diikuti kelompok industri sekunder sebesar 22,70 persen, dan kelompok industri primer sebesar 1,60 persen. Kelompok industri primer merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, seperti usaha pertanian dan penggalian yang sifatnya hanya mengolah sumber daya alam sehingga investasi cenderung kecil.

Kelompok industri sekunder terdiri dari industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air (termasuk pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang), dan konstruksi. Selanjutnya industri tersier, dikenal juga sebagai industri jasa, merupakan aktivitas ekonomi yang produksinya dalam bentuk jasa, seperti perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi dan makan-minum, informasi dan komunikasi, keuangan, dan kegiatan jasa-jasa lainnya.



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 4.6. Rerata Struktur Investasi D.I. Yogyakarta menurut Kelompok Industri, 2015-2019 (Persen)

Secara spasial, rata-rata investasi per tahun tertinggi selama periode 2015-2019 dicapai oleh Kabupaten Sleman dengan nilai sebesar 16,32 triliun rupiah. Investasi di Kabupaten Sleman tersebut menyumbang sekitar 40,21 persen terhadap total investasi D.I. Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan pencapaian PDRB Kabupaten Sleman yang selalu berada di urutan teratas. Berikutnya yang nilai investasinya lebih rendah dari Kabupaten Sleman adalah Kota Yogyakarta sebesar 9,09 triliun rupiah. Selanjutnya Kabupaten Bantul investasinya sebesar 6,16 triliun rupiah dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 4,75 triliun rupiah. Meskipun pada tahun 2019 terjadi peningkatan cukup tinggi dari periode sebelumnya tetapi secara rata-rata investasi Kabupaten Kulon Progo merupakan yang terendah, yaitu sebesar 4,27 triliun rupiah. Kontribusi rata-rata per tahun dari kegiatan investasi di kabupaten/kota tersebut masing-masing adalah sebesar 22,40 persen, 15,17 persen, 11,69 persen, dan 10,52 persen.

Tabel 4.5. Nilai Investasi D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota atas dasar Harga Berlaku, 2015-2019 (Juta Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018*	2019**	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	2.471.811	2.680.299	3.138.252	4.649.865	8.415.247	4.271.095
	7,74	7,73	8,16	10,39	15,85	10,52
Bantul	5.014.538	5.447.074	6.026.653	6.776.574	7.523.190	6.157.606
	15,71	15,70	15,67	15,14	14,17	15,17
Gunungkidul	3.838.253	4.191.192	4.619.422	5.212.741	5.868.153	4.745.952
	12,02	12,08	12,01	11,65	11,05	11,69
Sleman	13.070.196	14.256.321	15.729.575	18.196.071	20.330.117	16.316.456
	40,94	41,10	40,91	40,65	38,30	40,21
Yogyakarta	7.527.373	8.109.080	8.938.683	9.925.567	10.949.801	9.090.101
	23,58	23,38	23,25	22,17	20,63	22,40
Jumlah	31.922.170	34.683.966	38.452.585	44.760.818	53.086.508	40.581.209
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi DIY

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara;

Angka dicetak miring adalah *share* terhadap total (persen)

Tabel 4.6. Nilai Investasi D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota atas dasar Harga Konstan 2010, 2015-2019 (Juta Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018*	2019**	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	1.779.537	1.888.987	2.074.954	2.832.350	4.751.918	2.665.549
	7,64	7,65	8,02	9,99	14,85	9,93
Bantul	3.639.678	3.858.792	4.035.375	4.295.380	4.554.856	4.076.816
	15,63	15,64	15,59	15,15	14,23	15,19
Gunungkidul	2.834.167	3.017.611	3.151.049	3.367.364	3.628.720	3.199.782
	12,17	12,23	12,18	11,87	11,34	11,92
Sleman	9.462.039	10.043.997	10.496.743	11.413.350	12.243.403	10.731.906
	40,64	40,70	40,56	40,25	38,26	39,99
Yogyakarta	5.566.038	5.867.481	6.120.547	6.448.440	6.819.758	6.164.453
	23,91	23,78	23,65	22,74	21,31	22,97
Jumlah	23.281.461	24.676.868	25.878.668	28.356.883	31.998.654	26.838.507
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi DIY

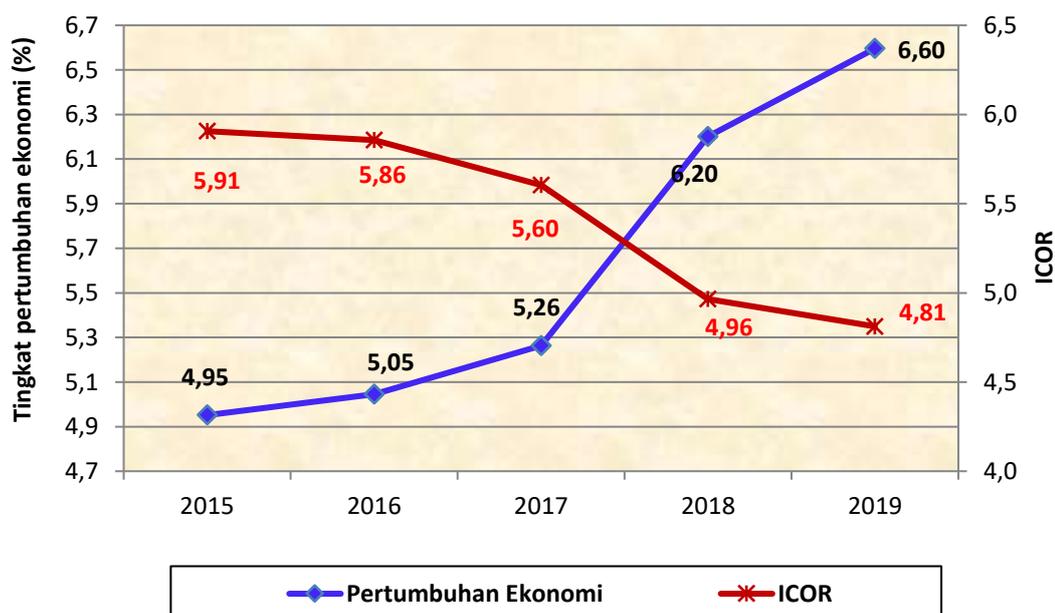
Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara;

Angka dicetak miring adalah *share* terhadap total (persen)

4.4. Angka ICOR D.I. Yogyakarta

4.4.1. ICOR Total

ICOR merupakan suatu angka yang menunjukkan besarnya tambahan kapital yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Nilai ICOR bisa menjadi salah satu indikator tingkat efisiensi penggunaan kapital dalam perekonomian suatu wilayah. Semakin kecil nilai ICOR menunjukkan bahwa kemampuan investasi untuk menghasilkan output semakin besar. Angka ICOR tidak selalu menunjukkan efisiensi penggunaan kapital tetapi juga intensitas penggunaan kapital dalam suatu proses produksi. Jika angka ICOR tinggi dapat diartikan investasi yang dilakukan kurang efisien atau aktivitas ekonomi tersebut bersifat *capital intensive*. Sebaliknya, jika angka ICOR relatif rendah berarti investasi lebih efisien atau aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut tidak memerlukan investasi yang besar.



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 4.7. Perkembangan ICOR dan Tingkat pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta, 2015-2019

Selama periode 2015-2019, angka ICOR D.I. Yogyakarta cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 angka ICOR D.I. Yogyakarta sebesar

5,91 dan semakin penurunan hingga mencapai level 4,81 pada tahun 2019. Angka ICOR menunjukkan banyaknya investasi yang dibutuhkan untuk memperoleh tambahan 1 (satu) unit output. Dengan demikian, angka ICOR sebesar 4,81 pada tahun 2019 dapat diartikan bahwa untuk memperoleh tambahan output sebesar 1 miliar rupiah diperlukan tambahan investasi sebesar 4,81 miliar rupiah. Sementara itu, pada tahun 2015 tambahan investasi yang diperlukan untuk menambah output sebesar 1 miliar rupiah adalah sebesar 5,91 miliar rupiah. Jika mengacu pada teori yang ada maka penurunan besar ICOR tersebut menunjukkan bahwa kegiatan investasi pada tahun 2019 sudah lebih efisien dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, perlu kehati-hatian menggunakan informasi ICOR untuk pengambilan kebijakan.

Selain penghitungan koefisien ICOR total D.I. Yogyakarta, penghitungan juga dilakukan untuk level kabupaten/kota. ICOR tertinggi pada tahun 2019 terjadi di Kabupaten Sleman yaitu sebesar 5,69. Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 5,27; Kabupaten Kulon Progo sebesar 4,56; Kabupaten Bantul sebesar 4,54; dan terendah Kota Yogyakarta sebesar 4,38.

Tabel 4.7. ICOR Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018*	2019**	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	6,41	6,32	5,28	3,75	4,56	5,26
Bantul	4,94	4,90	4,84	4,56	4,54	4,76
Gunungkidul	5,53	5,55	5,38	5,32	5,27	5,41
Sleman	6,83	6,85	6,66	5,71	5,69	6,35
Yogyakarta	5,13	5,13	4,97	4,74	4,38	4,87
D.I. Yogyakarta	5,91	5,86	5,60	4,96	4,81	5,43

Sumber: BPS Provinsi DIY

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Kegiatan ekonomi di Kabupaten Sleman yang didominasi oleh industri pengolahan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum yang pada umumnya memerlukan jenis investasi yang bersifat padat modal (*capital intensive*) menyebabkan ICOR di wilayah ini relatif lebih tinggi dibandingkan

kabupaten/kota yang lain di D.I. Yogyakarta. Industri pengolahan di Kabupaten Sleman umumnya didominasi oleh industri makanan dan minuman dan juga industri tekstil dan pakaian jadi. Industri tekstil lebih bersifat *capital intensive* sehingga memerlukan investasi yang lebih besar. Demikian pula pembangunan hotel, pusat perbelanjaan, jalan, dan gedung lainnya yang masih banyak dilakukan dan selama lima tahun terakhir peranannya juga semakin meningkat. Peranan kegiatan konstruksi yang semakin meningkat tersebut artinya juga semakin banyak modal yang digulirkan pada kegiatan yang bersifat *capital intensive* tersebut sehingga dalam kurun waktu 2015-2019 besaran ICOR Kabupaten Sleman selalu yang tertinggi di D.I. Yogyakarta.

Sebaliknya, Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan koefisien ICOR terendah pada tahun ini. Perekonomian Kota Yogyakarta didominasi oleh aktivitas jasa-jasa yang tidak memerlukan capital yang cukup besar seperti mesin-mesin di industri manufaktur. Lapangan usaha jasa-jasa yang berkembang cenderung mempunyai nilai ICOR yang relatif rendah.

Tabel 4.8. ICOR Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB, 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018*	2019**	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	6,27	6,18	5,18	3,69	4,52	5,17
Bantul	4,75	4,71	4,65	4,40	4,39	4,58
Gunungkidul	5,28	5,30	5,15	5,09	5,06	5,17
Sleman	6,52	6,54	6,36	5,46	5,46	6,07
Yogyakarta	4,89	4,89	4,74	4,53	4,19	4,65
D.I. Yogyakarta	5,66	5,61	5,37	4,77	4,64	5,21

Sumber: BPS Provinsi DIY

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Sementara itu penghitungan koefisien ICOR seluruh kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta dengan pendekatan investasi hanya terdiri dari PMTB (Investasi = PMTB) memberikan hasil nilai koefisien ICOR yang berbeda dari sisi besaran tetapi sama secara urutan, dengan penghitungan ICOR sebelumnya (Investasi = PMTB + Δ Inventori). Selama periode 2015-2019 rata-rata ICOR (Investasi =

PMTB) tertinggi adalah di Kabupaten Sleman dan terendah di Kabupaten Bantul (Tabel 4.8).

**Tabel 4.9. ICOR Provinsi se-Jabalnusra
(Investasi = PMTB + Δ Inventori), 2015-2019**

Provinsi	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DKI Jakarta	8,13	7,76	7,53	7,61	7,33
Jawa Barat	5,90	5,23	5,52	5,20	5,69
Jawa Tengah	5,68	6,00	6,11	6,19	6,02
DIY	5,91	5,86	5,60	4,96	4,81
Jawa Timur	5,75	5,45	5,54	5,53	5,46
Banten	5,79	5,96	5,67	5,67	6,03
Bali	5,66	5,54	6,14	5,57	6,12
NTB	1,62	5,42	344,50	-7,19	8,96
NTT	9,58	9,99	10,13	10,07	9,79
Indonesia	7,24	7,02	7,02	7,10	7,11

Sumber: BPS (diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Secara nasional, ICOR Indonesia selama lima tahun terakhir masih berada di level 7 sementara rata-rata negara Asia Tenggara memiliki ICOR di kisaran 3-4 (<https://nasional.kontan.co.id/news/icor-indonesia-masih-tinggi-menkeu-kualitas-pendidikan-dan-birokrasi-jadi-penyebab>). ICOR Indonesia yang masih cukup tinggi dibandingkan negara lain menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia cenderung kurang efisien sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Secara umum angka ICOR D.I. Yogyakarta lebih rendah dibandingkan dengan ICOR Indonesia, demikian pula jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Jabalnusra. Pada tahun 2019 angka ICOR D.I. Yogyakarta merupakan yang terendah (Tabel 4.9) atau dapat dikatakan bahwa aktivitas investasi D.I. Yogyakarta cenderung lebih efisien dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Jabalnusra. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi D.I.

Yogyakarta yang meningkat mencolok pada tahun ini. Sebaliknya, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan nilai ICOR tertinggi se-Jabalnusra. Selanjutnya provinsi lain di Jabalnusra memiliki nilai ICOR dalam kisaran 5-9. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi dengan angka yang cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 besaran ICOR Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 1,62 dan meningkat tajam menjadi 344,50 pada tahun 2017. Besaran ICOR yang sangat tinggi ini dapat diartikan bahwa besarnya peningkatan PMTB tidak diikuti dengan besarnya peningkatan output atau investasi yang dilakukan belum menghasilkan tambahan output. Pada tahun 2019 besaran ICOR Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali bernilai positif setelah sebelumnya bernilai negatif (tahun 2018).

**Tabel 4.10. ICOR Provinsi se-Jabalnusra
(Investasi = PMTB), 2015-2019**

Provinsi	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DKI Jakarta	8,06	7,79	7,39	7,31	7,31
Jawa Barat	5,16	4,58	4,89	4,63	5,09
Jawa Tengah	5,56	5,82	5,93	6,01	5,87
DIY	5,66	5,61	5,37	4,77	4,64
Jawa Timur	5,31	5,21	5,31	5,30	5,25
Banten	5,73	5,96	5,66	5,66	6,02
Bali	5,64	5,51	6,11	5,54	6,09
NTB	1,60	5,34	339,93	-7,12	8,88
NTT	9,33	9,89	10,02	9,90	9,62
Indonesia	6,97	6,73	6,75	6,72	6,87

Sumber: BPS (diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Dalam penghitungan ICOR dengan pendekatan investasi sama dengan PMTB dan perubahan inventori dihasilkan besaran ICOR yang lebih kecil dibandingkan dengan penghitungan ICOR sebelumnya (Investasi = PMTB). Meskipun demikian, D.I. Yogyakarta tetap merupakan provinsi dengan angka ICOR terendah dan angka ICOR Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap pada posisi yang tertinggi (Tabel 4.10).

4.4.2. ICOR menurut Lapangan Usaha

4.4.2.1. ICOR menurut Lapangan Usaha Tahunan

Berikut ini akan disajikan angka ICOR menurut lapangan usaha yang dihitung baik dengan menggunakan pendekatan investasi sebagai penjumlahan dari PMTB dan perubahan inventori maupun investasi hanya berupa PMTB saja. ICOR menurut lapangan usaha tidak mencerminkan efisiensi tetapi lebih mencerminkan karakteristik lapangan usaha tersebut.

Secara umum, angka ICOR yang dihasilkan dari pendekatan investasi sama dengan PMTB akan menghasilkan angka yang lebih rendah. Dalam penghitungan ICOR tersebut menggunakan *lag 0*, yang berarti bahwa investasi yang dilakukan pada tahun “t” diasumsikan juga akan menghasilkan nilai tambah pada tahun yang sama. Beberapa hal yang bisa dicermati dari hasil penghitungan ICOR tersebut, antara lain:

Pertama, secara total nilai ICOR pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang mengindikasikan bahwa aktivitas perekonomian D.I. Yogyakarta semakin efisien. Penurunan angka ICOR tersebut seiring dengan meningkatnya tingkat pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta. Dengan demikian angka ICOR yang semakin baik menunjukkan bahwa produktivitas kapital semakin meningkat. Dengan kondisi makroekonomi nasional dan regional yang juga semakin kondusif juga berdampak pada semakin membaiknya perekonomian D.I. Yogyakarta.

Kedua, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; jasa keuangan dan asuransi; serta *real estate* mempunyai ICOR yang relatif kecil dibandingkan lapangan usaha lainnya. Untuk sektor primer, angka ICOR yang relatif rendah disebabkan oleh proses produksi yang relatif pendek dan pembiayaan yang relatif rendah sehingga tidak terlalu memerlukan investasi yang besar. Lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi juga tidak memerlukan barang modal yang relatif besar dalam proses produksinya atau bisa dikatakan tidak bersifat *capital intensive*, demikian pula

untuk lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta real estate.

Tabel 4.11. ICOR Lapangan Usaha Tahunan Metode Standar Lag 0 dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,36	2,71	2,83	2,84	3,56
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	2,32	2,69	2,78	2,53	2,74
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,01	3,60	3,89	-0,71	3,67
c. Perikanan	1,78	1,65	1,59	1,35	-0,81
2. Pertambangan dan Penggalian	3,59	3,33	3,20	2,73	2,73
3. Industri Pengolahan	5,30	5,24	5,02	4,05	4,25
4. Pengadaan Listrik dan Gas	15,23	15,82	14,98	12,78	12,71
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,44	5,98	5,75	4,89	4,90
6. Konstruksi	5,25	4,88	4,69	3,99	4,00
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,85	4,58	4,38	3,73	3,74
8. Transportasi dan Pergudangan	13,47	13,76	14,53	16,69	22,10
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,04	6,38	5,93	4,94	4,78
a. Penyediaan Akomodasi	4,37	4,05	3,90	3,32	3,32
b. Penyediaan Makan Minum	7,82	7,26	6,98	5,94	5,95
10. Informasi dan Komunikasi	6,39	6,05	5,82	4,95	4,96
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,11	3,12	3,45	2,41	2,45
a. Jasa Perantara Keuangan	2,66	2,47	2,38	2,02	2,03
b. Lainnya	4,89	4,56	4,39	3,72	3,72
12. Real Estate	4,78	4,84	4,65	3,96	3,97
13. Jasa Perusahaan	6,04	5,60	5,39	4,59	4,59
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,60	7,05	6,78	5,77	5,78
15. Jasa Pendidikan	5,60	5,20	5,00	4,25	4,26
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,02	5,59	5,38	4,58	4,58
17. Jasa lainnya	5,82	5,40	5,19	4,42	4,43
PDRB	5,91	5,86	5,60	4,96	4,81

Sumber: BPS Provinsi DIY

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Tabel 4.12. ICOR Lapangan Usaha Tahunan Metode Standar Lag 0 dengan Pendekatan Investasi = PMTB, 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,27	2,60	2,71	2,73	3,43
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	2,22	2,57	2,67	2,43	2,64
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,89	3,45	3,73	-0,68	3,54
c. Perikanan	1,71	1,58	1,53	1,30	-0,78
2. Pertambangan dan Penggalian	3,44	3,19	3,07	2,62	2,63
3. Industri Pengolahan	5,08	5,01	4,81	3,90	4,10
4. Pengadaan Listrik dan Gas	14,59	15,15	14,36	12,28	12,25
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,17	5,73	5,51	4,70	4,72
6. Konstruksi	5,03	4,67	4,50	3,84	3,85
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,65	4,39	4,20	3,58	3,61
8. Transportasi dan Pergudangan	12,91	13,18	13,93	16,04	21,29
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,74	6,11	5,69	4,75	4,61
a. Penyediaan Akomodasi	4,18	3,88	3,74	3,19	3,20
b. Penyediaan Makan Minum	7,50	6,95	6,69	5,71	5,74
10. Informasi dan Komunikasi	6,13	5,80	5,58	4,76	4,78
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,98	2,99	3,31	2,32	2,36
a. Jasa Perantara Keuangan	2,55	2,37	2,28	1,94	1,95
b. Lainnya	4,69	4,36	4,21	3,58	3,58
12. Real Estate	4,58	4,63	4,46	3,81	3,82
13. Jasa Perusahaan	5,78	5,36	5,16	4,41	4,42
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,28	6,75	6,50	5,55	5,57
15. Jasa Pendidikan	5,36	4,98	4,79	4,09	4,10
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,77	5,35	5,15	4,40	4,42
17. Jasa lainnya	5,57	5,17	4,98	4,25	4,27
PDRB	5,66	5,61	5,37	4,77	4,64

Sumber: BPS Provinsi DIY

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Ketiga, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan mempunyai ICOR cukup tinggi. Hal ini berkaitan erat dengan karakter lapangan usaha tersebut yang bersifat padat modal dan

biasanya investasinya bersifat jangka panjang sehingga manfaat investasi tidak dapat dirasakan pada saat itu juga.

Keempat, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mempunyai nilai ICOR relatif tinggi. Hal ini bisa disebabkan oleh karena investasi pemerintah biasanya ditujukan untuk fasilitas pelayanan publik seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang tujuan utamanya bukan mencari profit.

4.4.2.2. ICOR Lapangan Usaha Metode Akumulasi

Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa angka ICOR merupakan suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Pada penghitungan ICOR dengan metode akumulasi, nilai investasi dan tambahan output merupakan akumulasi selama periode 2015 sampai dengan 2019. Dalam penghitungan ini juga dilakukan dengan dua pendekatan investasi, yaitu **dengan** dan **tanpa** memperhitungkan perubahan inventori.

Hasil perhitungan angka ICOR menurut lapangan usaha dengan metode akumulasi pada periode 2015-2019 di D.I. Yogyakarta baik melalui pendekatan investasi dengan atau tanpa perubahan inventori disajikan pada Tabel 4.10. Besaran angka ICOR D.I. Yogyakarta dengan metode akumulasi selama periode 2015-2019 mencapai 5,34 (Investasi = PMTB + Δ Inventori) dan 5,13 (Investasi = PMTB). Angka ICOR sebesar 5,34 menggambarkan bahwa untuk memperoleh penambahan output senilai 1 miliar rupiah dalam rentang periode tersebut dibutuhkan tambahan investasi sebanyak 5,34 miliar rupiah. Besaran angka ICOR mencerminkan produktivitas dari pengeluaran barang modal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai target yang diinginkan. Semakin kecil angka ICOR suatu wilayah menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan di wilayah tersebut semakin efisien. Selanjutnya pembahasan akan menggunakan angka ICOR dengan pendekatan investasi dengan memperhitungkan perubahan inventori (Investasi = PMTB + Δ Inventori).

Tabel 4.13. ICOR Lapangan Usaha Metode Akumulasi, Lag 0 dengan Pendekatan Investasi = PMTB dengan dan tanpa Perubahan Inventori, 2015-2019

Lapangan Usaha	Investasi = PMTB + Δ Inventori	Investasi = PMTB
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,79	2,68
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	2,59	2,49
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	5,84	5,60
c. Perikanan	5,23	5,02
2. Pertambangan dan Penggalian	2,84	2,73
3. Industri Pengolahan	4,67	4,48
4. Pengadaan Listrik dan Gas	14,62	14,03
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,31	5,10
6. Konstruksi	4,30	4,13
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,25	4,08
8. Transportasi dan Pergudangan	16,15	15,51
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,62	5,39
a. Penyediaan Akomodasi	3,61	3,47
b. Penyediaan Makan Minum	6,71	6,44
10. Informasi dan Komunikasi	5,56	5,33
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,80	2,68
a. Jasa Perantara Keuangan	2,28	2,19
b. Lainnya	4,20	4,03
12. Real Estate	4,40	4,22
13. Jasa Perusahaan	5,19	4,98
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,68	6,40
15. Jasa Pendidikan	4,80	4,61
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,18	4,97
17. Jasa lainnya	5,04	4,83
PDRB	5,34	5,13

Sumber: BPS Provinsi DIY (diolah)

Lapangan usaha dengan angka ICOR terkecil adalah pertanian, kehutanan, dan peternakan dengan sebesar 2,79. Artinya setiap penambahan output sebesar 1 miliar rupiah memerlukan investasi sebesar 2,79 miliar rupiah.

Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas investasi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan peternakan relatif cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata (ICOR total), atau dengan kata lain kegiatan investasi pada lapangan usaha ini cukup efisien. Sebagian besar komoditas pertanian mempunyai proses produksi kurang dari satu tahun (kecuali untuk tanaman tahunan), dan sebagian besar inputnya merupakan input primer. Sementara input antara (*intermediate cost*) sebagian besar digunakan untuk pembelian benih/bibit, pupuk, pakan, dan pestisida/obat-obatan. Sebagian besar usaha pertanian di D.I. Yogyakarta merupakan usaha mikro-kecil yang menggunakan sedikit kapital.

Selanjutnya, lapangan usaha yang mempunyai angka ICOR terkecil kedua adalah jasa keuangan dan asuransi, dengan nilai ICOR 2,80. Artinya, untuk meningkatkan output senilai 1 miliar rupiah diperlukan tambahan investasi sebesar 2,80 miliar rupiah. Lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi juga tidak memerlukan barang modal yang relatif besar dalam proses produksinya atau bisa dikatakan tidak bersifat kapital intensive. Selain itu proses produksinya juga relatif cepat.

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian mempunyai angka ICOR sebesar 2,84. Artinya setiap penambahan 1 miliar rupiah output memerlukan investasi sebesar 2,84 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas investasi pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian relatif cukup tinggi. Sebagian besar aktivitas pertambangan dan penggalian di D.I. Yogyakarta berupa penggalian batu dan pasir yang merupakan usaha mikro dan kecil dan tidak memerlukan barang modal yang besar.

Lapangan usaha yang mempunyai angka ICOR pada kisaran angka antara 4 dan 6 adalah industri pengolahan (4,67); pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (5,31); konstruksi (4,30); perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (4,25); penyediaan akomodasi dan makan minum (5,62); informasi dan komunikasi (5,56); *real estate* (4,40); jasa perusahaan (5,19); administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (6,68); jasa pendidikan (4,80); jasa kesehatan dan kegiatan sosial (5,18); serta jasa lainnya (5,04).

Sementara itu lapangan usaha pengadaan listrik dan gas serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan mempunyai angka ICOR yang relatif tinggi atau dapat dikatakan lebih bersifat *capital intensive* dibandingkan lapangan usaha yang lain. Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas mempunyai angka ICOR sebesar 14,62 yang berarti untuk meningkatkan output sebesar 1 miliar rupiah memerlukan investasi sebesar 14,62 miliar rupiah, sedangkan pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan untuk meningkatkan output 1 miliar rupiah diperlukan investasi sebesar 16,15 miliar rupiah.

4.4.2.3. ICOR Lapangan Usaha Metode Standar

Secara umum angka ICOR dengan metode standar seperti pada Tabel 4.14 tidak jauh berbeda dengan hasil penghitungan menggunakan metode akumulasi (Tabel 4.13). Untuk beberapa lapangan usaha, angka ICOR dengan metode standar lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penghitungan dengan metode akumulasi dan untuk beberapa lapangan usaha lainnya justru sebaliknya. Namun perbedaan hasil penghitungan angka ICOR dengan kedua metode tidak terlalu besar. Pada metode akumulasi akan menghilangkan pengaruh angka ekstrim pada suatu tahun tertentu. Sedangkan metode standar tidak bisa menghilangkan pengaruh angka sangat ekstrim yang dapat menyebabkan bias. Meskipun demikian, metode standar dapat mengidentifikasi kegiatan lapangan usaha yang kurang efisien atau kapasitas produksi terpasang belum dimanfaatkan secara penuh.

Pemilihan metode penghitungan ICOR tergantung pada asumsi yang digunakan atau prediksi keadaan riil di lapangan, misalnya karakteristik masing-masing lapangan usaha, teknologi yang digunakan, sistem manajemen, kondisi pasar, dan sebagainya. Selain itu, faktor daya tarik masing-masing lapangan usaha di mata para investor dan berbagai kebijakan serta peraturan pemerintah juga mempengaruhi perbedaan angka ICOR pada masing-masing lapangan usaha.

Angka ICOR pada Tabel 4.14 merupakan hasil penghitungan dengan menggunakan metode standar lag 0 dan diasumsikan produksi berada pada

kondisi *full capacity*. Dengan demikian, investasi yang ditanamkan sepenuhnya digunakan untuk menaikkan output. Pendekatan investasi yang digunakan pada perhitungan metode ini adalah dengan dan tanpa memperhitungkan perubahan inventori.

Tabel 4.14. ICOR Lapangan Usaha Metode Standar, Lag 0 dengan Pendekatan Investasi = PMTB dengan dan tanpa Perubahan Inventori, 2015-2019

Lapangan Usaha	Investasi = PMTB + Δ Inventori	Investasi = PMTB
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,86	2,75
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	2,61	2,51
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,69	2,58
c. Perikanan	1,11	1,07
2. Pertambangan dan Penggalian	3,12	2,99
3. Industri Pengolahan	4,77	4,58
4. Pengadaan Listrik dan Gas	14,31	13,73
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,59	5,37
6. Konstruksi	4,56	4,38
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,26	4,09
8. Transportasi dan Pergudangan	16,11	15,47
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,82	5,58
a. Penyediaan Akomodasi	3,79	3,64
b. Penyediaan Makan Minum	6,79	6,52
10. Informasi dan Komunikasi	5,64	5,41
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,91	2,79
a. Jasa Perantara Keuangan	2,31	2,22
b. Lainnya	4,26	4,08
12. Real Estate	4,44	4,26
13. Jasa Perusahaan	5,24	5,03
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,60	6,33
15. Jasa Pendidikan	4,86	4,66
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,23	5,02
17. Jasa lainnya	5,05	4,85
PDRB	5,43	5,21

Sumber: BPS Provinsi DIY (diolah)

Berdasarkan pendekatan investasi sama dengan PMTB ditambah perubahan inventori, selama periode 2015-2019 diperoleh ICOR D.I. Yogyakarta sebesar 5,43. Jika ditinjau menurut lapangan usaha, maka lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; jasa keuangan dan asuransi; serta pertambangan dan penggalian merupakan lapangan usaha ekonomi yang mempunyai ICOR relatif rendah. Lapangan usaha tersebut lebih bersifat *labour intensive*. Sementara itu lapangan usaha pengadaan listrik dan gas serta lapangan usaha pengangkutan dan pergudangan merupakan lapangan usaha dengan perolehan ICOR relatif tinggi. Kedua aktivitas ekonomi tersebut lebih bersifat *capital intensive*.

Angka ICOR lapangan usaha pertanian yang relatif kecil bisa disebabkan oleh proses produksi pertanian masih sangat tergantung kepada alam. Peranan sumber daya alam masih cukup besar dalam menentukan produksi/output. Dengan penguasaan lahan yang relatif sempit, mekanisasi pertanian masih terbatas dan biaya produksi masih didominasi oleh *primary cost* atau nilai tambah bruto. Sementara porsi *intermediate cost*, yaitu input yang habis dalam satu kali produksi, relatif kecil. Demikian juga halnya dengan lapangan usaha pertambangan dan penggalian di DIY yang bersifat *labor intensive* karena pada umumnya merupakan usaha mikro/kecil dan tidak menggunakan barang modal yang besar.

Sebaliknya, tingginya angka perolehan ICOR untuk lapangan usaha pengadaan listrik dan gas karena investasinya biasanya bersifat berjangka panjang dan padat modal. Akibatnya nilai investasi yang relatif besar pada saat ini belum tentu langsung diikuti oleh naiknya nilai tambah kedua lapangan usaha tersebut. Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas kadang-kadang memerlukan waktu yang panjang, bisa mencapai 30 tahun untuk mencapai *break even point (BEP)*. Untuk lapangan usaha pengangkutan dan pergudangan, tingginya angka ICOR disebabkan oleh besarnya nilai investasi yang diperlukan untuk pembelian mesin, kendaraan, dan peralatan lainnya. Lapangan usaha ini termasuk dalam lapangan usaha ekonomi yang bersifat padat modal.

Selanjutnya penghitungan angka ICOR juga bisa dilakukan dengan memperhitungkan waktu perolehan manfaat dari investasi yang dilakukan.

Dengan metode ini dapat dilihat besarnya investasi berdasarkan waktu yang diinginkan untuk memperoleh manfaat investasi. Dalam kondisi ideal, jika ingin memperoleh manfaat yang lebih cepat maka investasi yang dilakukan juga harus semakin banyak. Meskipun demikian hal tersebut tidak selalu berlaku sama.

Tabel 4.15. ICOR Lapangan Usaha Metode Standar Lag 0, Lag 1, dan Lag 2, dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, 2015-2019

Lapangan Usaha	Lag-0	Lag-1	Lag-2
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,86	3,23	3,64
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	2,61	2,88	3,19
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,69	2,89	3,12
c. Perikanan	1,11	1,19	1,27
2. Pertambangan dan Penggalian	3,12	2,82	2,46
3. Industri Pengolahan	4,77	4,17	3,54
4. Pengadaan Listrik dan Gas	14,31	12,21	10,06
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,59	4,72	3,87
6. Konstruksi	4,56	4,22	3,83
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,26	4,39	4,51
8. Transportasi dan Pergudangan	16,11	15,05	13,91
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,82	6,30	6,82
a. Penyediaan Akomodasi	3,79	4,10	4,44
b. Penyediaan Makan Minum	6,79	7,38	7,98
10. Informasi dan Komunikasi	5,64	5,04	4,40
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,91	2,83	2,74
a. Jasa Perantara Keuangan	2,31	2,22	2,10
b. Lainnya	4,26	4,17	4,04
12. Real Estate	4,44	4,35	4,21
13. Jasa Perusahaan	5,24	5,14	4,98
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,60	6,86	7,11
15. Jasa Pendidikan	4,86	5,11	5,33
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,23	5,49	5,74
17. Jasa lainnya	5,05	5,31	5,54
PDRB	5,43	5,33	5,14

Sumber: BPS Provinsi DIY (diolah)

Tabel 4.16. ICOR Lapangan Usaha Metode Standar Lag 0, Lag 1, dan Lag 2, dengan Pendekatan Investasi = PMTB, 2015-2019

Lapangan Usaha	Lag-0	Lag-1	Lag-2
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,75	3,05	3,48
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	2,51	2,71	3,03
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,58	2,71	3,01
c. Perikanan	1,07	1,12	1,21
2. Pertambangan dan Penggalian	2,99	2,72	2,37
3. Industri Pengolahan	4,58	3,82	3,24
4. Pengadaan Listrik dan Gas	13,73	11,72	9,66
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,37	4,51	3,69
6. Konstruksi	4,38	3,99	3,62
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,09	4,36	4,48
8. Transportasi dan Pergudangan	15,47	14,24	13,15
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,58	6,17	6,67
a. Penyediaan Akomodasi	3,64	3,99	4,32
b. Penyediaan Makan Minum	6,52	7,26	7,85
10. Informasi dan Komunikasi	5,41	4,81	4,20
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,79	2,68	2,59
a. Jasa Perantara Keuangan	2,22	2,08	1,97
b. Lainnya	4,08	3,94	3,82
12. Real Estate	4,26	4,11	3,98
13. Jasa Perusahaan	5,03	4,85	4,70
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,33	6,48	6,72
15. Jasa Pendidikan	4,66	5,07	5,30
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,02	5,46	5,70
17. Jasa lainnya	4,85	5,27	5,51
PDRB	5,21	5,09	4,91

Sumber: BPS Provinsi DIY (diolah)

Hasil penghitungan angka ICOR dengan asumsi investasi yang dilakukan pada tahun tertentu baru akan menghasilkan output yang diinginkan setelah satu tahun dan dua tahun berikutnya disajikan pada Tabel 4.15 dan Tabel 4.16. Pada Tabel 4.15 menggunakan pendekatan investasi merupakan penjumlahan dari

PMTB dan perubahan inventori, sedangkan pada Tabel 4.16 menggunakan pendekatan investasi sama dengan PMTB saja.

Secara total, hasil penghitungan angka ICOR dengan *time lag 0*, *time lag 1*, dan *time lag 2*, baik dengan maupun tanpa memperhitungkan perubahan inventori, mengalami penurunan. Angka ICOR (Investasi = PMTB + Δ Inventori) pada *time lag 0* sebesar 5,43 menjadi sebesar 5,33 (*time lag 1*), dan menjadi sebesar 5,14 (*time lag 2*). Hal ini mengindikasikan produktivitas kapital yang semakin meningkat atau proses produksi semakin efisien seiring bertambahnya waktu proses produksi.

Demikian pula hasil penghitungan ICOR (Investasi = PMTB) juga diperoleh tren yang sama. Pada *time lag 0* angka ICOR yang dihasilkan sebesar 5,21, kemudian menjadi sebesar 5,09 (*time lag 1*), dan menjadi sebesar 4,91 (*time lag 2*). Jika dilihat dari besarnya angka ICOR tersebut dapat dikatakan bahwa kebutuhan investasi semakin menurun seiring dengan semakin lamanya waktu yang diinginkan untuk memperoleh manfaat dari kegiatan investasi.

Jika dicermati lebih lanjut, ada 10 lapangan usaha yang mengalami penurunan angka ICOR pada *lag-1* dan *lag-2* jika dibandingkan dengan nilai ICOR *lag-0*, yaitu pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; konstruksi; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; serta jasa perusahaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesepuluh lapangan usaha tersebut mengalami peningkatan produktivitas kapital setelah satu atau dua tahun.

Sebaliknya, lapangan usaha yang mengalami penurunan produktivitas kapital dicerminkan dengan kenaikan angka ICOR yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya.

4.4.2.4. Keterbandingan Angka ICOR

Secara total, angka ICOR yang dihasilkan dari dua metode tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan yang mencolok pada periode 2015-2019. Sementara itu jika dilihat menurut masing-masing kategori, ada beberapa lapangan usaha yang menunjukkan perbedaan cukup mencolok baik lebih tinggi maupun lebih rendah. Pada penghitungan angka ICOR untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan metode akumulasi menghasilkan angka yang lebih tinggi dibandingkan ketika dihitung dengan metode standar. Lebih dalam lagi diketahui perbedaan yang mencolok terjadi terutama pada subkategori kehutanan dan penebangan kayu. Seperti diketahui lapangan usaha kehutanan merupakan kegiatan yang memiliki proses produksi relatif cukup panjang, sejak penanaman hingga dapat dipetik hasilnya memerlukan waktu sekitar 10-15 tahun.

Selain pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; hasil penghitungan ICOR dengan metode akumulasi untuk lapangan usaha transportasi dan pergudangan juga menghasilkan besaran yang lebih tinggi dibandingkan hasil penghitungan dengan metode akumulasi. Demikian pula dengan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas.

Sebaliknya, besaran ICOR untuk lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang dihitung dengan metode akumulasi menghasilkan angka yang lebih rendah dibandingkan jika dihitung dengan metode standar. Kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan di D.I. Yogyakarta adalah penggalian yang lebih bersifat *labour intensive*, tidak memerlukan modal yang besar secara bersinambungan.

Selain keterbandingan hasil penghitungan ICOR dengan dua metode, pada Tabel 4.17 juga disajikan perkembangan nilai tambah menurut lapangan usaha dengan tahun dasar 2010. Angka indeks perkembangan dapat digunakan untuk mengidentifikasi lapangan usaha yang berkembang relatif lebih cepat dibandingkan kondisi tahun 2010. Pada tahun 2019, indeks perkembangan PDRB D.I. Yogyakarta mencapai 161,60 persen. Hal ini berarti selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun terakhir perekonomian D.I. Yogyakarta meningkat sebesar 61,60 persen dibandingkan kondisi tahun 2010.

Tabel 4.17. ICOR Lapangan Usaha Metode Standar dan Akumulasi, Indeks Perkembangan PDRB, dan Tingkat pertumbuhan ekonomi, 2015-2019

Lapangan Usaha	ICOR 2015-2019				Indeks Perkembangan Konstan 2019, 2010=100	LPE Rata-rata 2015-2019
	Standar			Akumulasi		
	Lag-0	Lag-1	Lag-2			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,86	3,23	3,64	2,79	112,9	1,64
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	2,61	2,88	3,19	2,59	112,7	1,84
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,69	2,89	3,12	5,84	109,7	0,43
c. Perikanan	1,11	1,19	1,27	5,23	125,0	0,07
2. Pertambangan dan Penggalian	3,12	2,82	2,46	2,84	137,1	4,29
3. Industri Pengolahan	4,77	4,17	3,54	4,67	143,3	5,41
4. Pengadaan Listrik dan Gas	14,31	12,21	10,06	14,62	174,4	6,65
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,59	4,72	3,87	5,31	135,8	4,93
6. Konstruksi	4,56	4,22	3,83	4,30	184,7	9,91
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,26	4,39	4,51	4,25	167,9	5,62
8. Transportasi dan Pergudangan	16,11	15,05	13,91	16,15	150,4	4,87
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,82	6,30	6,82	5,62	178,0	6,84
a. Penyediaan Akomodasi	3,79	4,10	4,44	3,61	240,9	12,73
b. Penyediaan Makan Minum	6,79	7,38	7,98	6,71	165,2	5,36
10. Informasi dan Komunikasi	5,64	5,04	4,40	5,56	189,1	7,09
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,91	2,83	2,74	2,80	186,8	5,60
a. Jasa Perantara Keuangan	2,31	2,22	2,10	2,28	194,2	5,36
b. Lainnya	4,26	4,17	4,04	4,20	168,7	6,26
12. Real Estate	4,44	4,35	4,21	4,40	166,7	5,38
13. Jasa Perusahaan	5,24	5,14	4,98	5,19	169,4	5,41
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,60	6,86	7,11	6,68	156,5	4,36
15. Jasa Pendidikan	4,86	5,11	5,33	4,80	168,5	5,28
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,23	5,49	5,74	5,18	179,5	5,75
17. Jasa lainnya	5,05	5,31	5,54	5,04	167,6	5,98
PDRB	5,43	5,33	5,14	5,34	161,6	5,77

Sumber: BPS Provinsi DIY (diolah)

Dari 17 kategori, ada beberapa lapangan usaha yang berkembang relatif lebih pesat dibandingkan lapangan usaha lain. Misalnya lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum untuk subkategori penyediaan akomodasi dengan indeks perkembangan sebesar 240,90 persen. Artinya selama 9 (sembilan) tahun terakhir nilai tambah untuk kegiatan penyediaan akomodasi meningkat hampir 2,5 kali lipat. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, penyediaan akomodasi merupakan faktor pendukung utama untuk pengembangan pariwisata di D.I. Yogyakarta. Kegiatan jasa keuangan dan asuransi terutama subkategori jasa perantara keuangan juga meningkat cukup pesat mencapai 194,20 persen. Demikian pula untuk lapangan usaha informasi dan komunikasi dengan indeks perkembangan mencapai 178 persen. Sementara itu untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang indeks perkembangannya masih di bawah 150 persen. Terutama pertanian, kehutanan, dan perikanan nilai tambahnya selama periode 2010-2019 hanya sebesar 112,90 persen atau merupakan indeks perkembangan yang terendah. Hal ini berarti selama 9 (sembilan) tahun nilai tambah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya meningkat sebesar 12,90 persen.

4.5. Kebutuhan dan Pilihan Investasi

Kebutuhan investasi selama periode 2020-2022 dihitung berdasarkan angka ICOR dengan metode standar untuk periode 2015-2019 dengan menggunakan pendekatan investasi sama dengan PMTB plus perubahan inventori (Tabel 4.7). Target pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta yang dipergunakan diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) D.I. Yogyakarta, sementara target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman diperoleh dari Bappeda Kabupaten Sleman.

Selama periode 2015-2019, rata-rata angka ICOR D.I. Yogyakarta sebesar 5,43 dan asumsi laju indeks implisit investasi sebesar 4,95 persen per tahun. Target pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta pada tahun 2020 pada tingkat moderat ditetapkan sebesar 2,39 persen. Untuk mencapai target

pertumbuhan tersebut diperlukan investasi sebesar 23,33 triliun rupiah. Pada tahun 2021, dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79 persen maka diperlukan investasi sebesar 50,25 triliun rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2022 diperlukan investasi sebesar 55,61 triliun rupiah untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 4,82 persen.

Tabel 4.18. Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta, 2020-2022

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	Δ Y (Juta Rupiah)	Rasio Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					ADH Konstan (Juta Rupiah)	ADH Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2020	2,39	106.987.010	2.497.304	12,67	13.556.748	23.332.046
2021	4,79	112.111.688	5.124.678	24,81	27.819.588	50.247.994
2022	4,82	117.515.472	5.403.783	24,96	29.334.727	55.605.894

Catatan:

ICOR Standar 2015-2019	:	5,43
Indeks Implisit Investasi 2019	:	163,99
PDRB Konstan 2019	:	104.489.706
Asumsi Laju Indeks Implisit	:	4,95

Tabel 4.19. Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, 2020-2022

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	Δ Y (Juta Rupiah)	Rasio Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					ADH Konstan (Juta Rupiah)	ADH Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2020	1,51	35.822.685	532.876	9,44	3.383.256	5.725.600
2021	3,90	37.219.769	1.397.085	23,83	8.870.158	15.804.893
2022	4,16	38.768.112	1.548.342	25,36	9.830.500	18.442.078

Catatan:

ICOR Standar 2015-2019	:	6,35
Indeks Implisit Investasi 2019	:	166,05
PDRB Konstan 2019	:	35.289.808
Asumsi Laju Indeks Implisit	:	5,29

Selama periode 2015-2019, rata-rata angka ICOR Kabupaten Sleman sebesar 6,35 dan asumsi laju indeks implisit investasi sebesar 5,29 persen per tahun. Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 1,51 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut diperlukan investasi sebesar 5,72 triliun rupiah. Pada tahun 2021, dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 3,90 persen maka diperlukan investasi sebesar 15,80 triliun rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2022 diperlukan investasi sebesar 18,44 triliun rupiah untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 4,16 persen.

Untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, karena anggaran pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota relatif terbatas. Oleh karena itu, pihak swasta dan rumah tangga diharapkan dapat turut berperan dalam pembentukan modal di wilayah D.I. Yogyakarta. Untuk menarik investor swasta baik dari dalam maupun luar provinsi serta luar negeri, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan investasi pada suatu lapangan usaha ekonomi. Beberapa hal berikut ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan investasi.

Pertama, dalam melakukan investasi dapat dilakukan dengan melihat karakteristik lapangan usaha, ada yang bersifat padat modal (*capital intensive*) dan ada yang bersifat padat karya (*labor intensive*). Jika suatu lapangan usaha memiliki angka ICOR yang rendah tidak selalu berarti bahwa lapangan usaha tersebut lebih efisien, demikian pula sebaliknya. Jika lapangan usaha tersebut bersifat padat modal maka diperlukan investasi yang banyak sehingga ICOR cenderung besar, contohnya lapangan usaha transportasi dan listrik. Sebaliknya jika suatu lapangan usaha tersebut memiliki ICOR rendah dapat berarti bahwa lapangan usaha tersebut memang tidak memerlukan modal yang besar seperti misalnya lapangan usaha pertanian.

Kedua, lapangan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar seperti industri manufaktur. Meskipun mempunyai angka ICOR yang relatif tinggi, lapangan usaha dengan tenaga kerja yang lebih banyak bisa menjadi prioritas dalam berinvestasi. Investasi pada lapangan usaha ini akan membantu mengatasi masalah pengangguran di wilayah tersebut. Berkurangnya

pengangguran akan mengurangi kemiskinan. Dan berkurangnya kemiskinan akan berdampak pada teratasinya masalah-masalah ikutan lain seperti gizi buruk, buta huruf, kejahatan dan lain-lain.

Ketiga, lapangan usaha yang mempunyai *forward linkages* dan *backward linkages* tinggi. *Forward linkage* adalah kegiatan dimana sektor unggulan tersebut mampu mendorong sektor lain supaya lebih berkembang. Sedangkan *backward linkage* adalah kegiatan sektor unggulan yang membutuhkan sektor lain untuk kelancaran kegiatannya. Investasi pada lapangan usaha ini akan memberikan *multiplier effect* yang relatif lebih besar. Investasi pada lapangan usaha ini juga akan menciptakan pasar bagi komoditi lainnya, sehingga akan menggerakkan perekonomian wilayah.

Keempat, lapangan usaha yang mempunyai potensi pasar yang cukup besar. Kegiatan investasi pada lapangan usaha ini akan mampu untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik sehingga tidak perlu melakukan impor dan sebaliknya jika produksi berlebih bisa diekspor.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, pilihan investasi juga harus mempertimbangkan kepemilikan sumber daya (*resource endowments*) lokal, kebijakan pemerintah mengenai konservasi sumber daya alam, dan juga faktor lainnya.

Berdasarkan hasil penghitungan ICOR selama periode 2015-2019 diketahui bahwa aktivitas ekonomi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; jasa keuangan dan asuransi; serta real estate mempunyai besaran ICOR yang relatif rendah (di bawah 4). Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja selama periode 2017-2019 menunjukkan bahwa lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; serta industri pengolahan merupakan lapangan usaha dengan kemampuan menyerap tenaga kerja yang relatif tinggi dengan proporsi di atas 17 persen (Tabel 4.24). Selanjutnya dilihat dari dampak penggandanya (*multiplier effects*), lapangan kerja industri pengolahan

mempunyai dampak pengganda yang relatif tinggi (BPS D.I. Yogyakarta dan BAPPEDA D.I. Yogyakarta, 2012).

Tabel 4.20. Penyerapan Tenaga Kerja D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha, 2017-2019

Lapangan Usaha	Tenaga Kerja (orang)			Penyerapan Tenaga Kerja (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	451.861	432.057	405.855	21,37	20,40	19,01
2. Pertambangan dan Penggalian	14.413	18.772	15.881	0,68	0,89	0,74
3. Industri Pengolahan	340.258	346.919	363.931	16,09	16,38	17,05
4. Pengadaan Listrik dan Gas	3.633	6.028	3.683	0,17	0,28	0,17
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.507	5.283	4.086	0,21	0,25	0,19
6. Konstruksi	153.306	160.636	143.647	7,25	7,58	6,73
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	383.976	393.305	404.681	18,16	18,57	18,96
8. Transportasi dan Pergudangan	56.809	76.344	84.860	2,69	3,60	3,98
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	187.079	207.788	201.257	8,85	9,81	9,43
10. Informasi dan Komunikasi	29.408	16.217	20.970	1,39	0,77	0,98
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	38.792	34.382	32.805	1,83	1,62	1,54
12. Real Estate	1.892	1.956	1.400	0,09	0,09	0,07
13. Jasa Perusahaan	63.004	49.970	52.267	2,98	2,36	2,45
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	66.438	73.888	76.859	3,14	3,49	3,60
15. Jasa Pendidikan	130.288	118.129	147.483	6,16	5,58	6,91
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	45.609	35.184	46.482	2,16	1,66	2,18
17. Jasa lainnya	142.854	141.534	128.603	6,76	6,68	6,02
PDRB	2.114.127	2.118.392	2.134.750	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi DIY (diolah dari Sakernas periode Bulan Agustus)

Berdasarkan beberapa indikator di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor bisa dijadikan prioritas utama investasi. Hal ini karena lapangan usaha tersebut mempunyai ICOR yang relatif rendah, mampu menyerap tenaga kerja cukup tinggi, serta perkembangannya relatif pesat. Prioritas investasi berikutnya adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan karena mempunyai ICOR yang relatif rendah, kemampuan menyerap tenaga kerja tinggi. Namun demikian, untuk mengembangkan lapangan usaha pertanian, perlu memperhatikan ketersediaan sumber daya lahan pertanian yang cenderung mengalami konversi menjadi lahan non-pertanian (perumahan/bangunan tempat tinggal maupun untuk usaha). Selanjutnya, lapangan usaha industri pengolahan bisa menjadi prioritas investasi berikutnya. Angka ICOR industri pengolahan relatif rendah dan mempunyai serapan tenaga kerja yang cukup tinggi, yaitu di atas 18 persen selama tahun 2017-2019. Selain itu berdasarkan penghitungan Tabel Input Output D.I. Yogyakarta 2010, industri pengolahan mempunyai *forward linkages* dan *backward linkages* yang relatif tinggi.

Selanjutnya lapangan usaha jasa pendidikan juga bisa menjadi prioritas investasi lainnya, karena mempunyai serapan tenaga kerja yang cukup tinggi, yaitu 6,91 persen dan besaran ICOR yang relatif rendah, yaitu 4,10. Selain itu D.I. Yogyakarta sudah sejak dulu terkenal sebagai salah satu daerah tujuan untuk menuntut ilmu. Sementara itu jika pertimbangan utama adalah angka ICOR, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi dan real estate bisa dijadikan pilihan dalam melakukan investasi di D.I. Yogyakarta. Sebaliknya, jika penyerapan tenaga kerja merupakan pertimbangan utama maka lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dapat menjadi alternatif pemilihan investasi. Alternatif investasi lain adalah konstruksi karena mempunyai serapan tenaga kerja yang relatif tinggi dan besaran ICOR relatif rendah.

Di sisi lain, lapangan usaha pertambangan dan penggalian meskipun mempunyai nilai ICOR yang relatif rendah tidak direkomendasikan untuk menjadi pilihan prioritas investasi karena potensi sumber daya alam tambang dan mineral relatif kecil. Potensi lapangan usaha ini sebagian besar berupa bahan galian batu dan pasir. Selain potensi yang relatif kecil, isu kerusakan lingkungan menjadi salah satu alasan untuk tidak terlalu mengembangkan kegiatan penggalian.

Seperti diketahui bahwa kegiatan penggalian ini bisa mengganggu keseimbangan alam sehingga diperlukan upaya untuk melindungi daerah aliran sungai (DAS).

Tabel 4.21. Jumlah Usaha/Perusahaan dan Jumlah Tenaga Kerja menurut Kategori di D.I. Yogyakarta, 2016

Kategori	Usaha/Perusahaan		Tenaga Kerja	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	188.517	35,32	339.810	25,69
Industri pengolahan	146.440	27,44	375.475	28,39
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	93.012	17,43	183.410	13,87
Lainnya	105.701	19,81	423.847	32,05
Jumlah	533.670	100,00	1.322.542	100,00

Sumber: BPS Provinsi DIY (diolah dari hasil Sensus Ekonomi 2016)

Pertimbangan lain untuk melakukan investasi selain dari nilai ICOR dan serapan tenaga kerja adalah potensi ekonomi wilayah tersebut. Salah satu indikator untuk melihat potensi ekonomi suatu wilayah dengan melihat jumlah kegiatan usaha di wilayah itu. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) ada tiga kategori kegiatan ekonomi yang cukup dominan di D.I. Yogyakarta. Ketiga kategori tersebut adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (35,32%); kategori industri pengolahan (27,44%); dan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum (17,43%). Tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan usaha tersebut masing-masing sebesar 25,69 persen, 28,38 persen, dan 13,87 persen. Konsep tenaga kerja di sini adalah jumlah orang yang bekerja pada lapangan usaha di D.I. Yogyakarta, baik penduduk D.I. Yogyakarta maupun luar D.I. Yogyakarta. Data Sensus Ekonomi 2016 mencakup semua lapangan usaha selain pertanian.

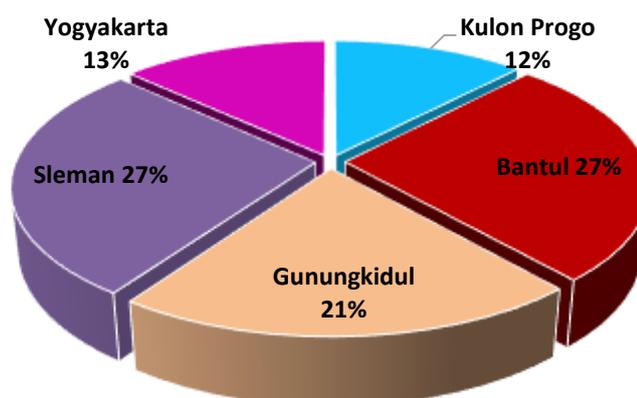
Berdasarkan skala usaha, sebagian besar usaha di DIY merupakan usaha mikro dan kecil (UMK). Hasil SE2016 menunjukkan bahwa UMK mendominasi perekonomian D.I. Yogyakarta dengan *share* mencapai 98,36 persen, sedangkan usaha menengah dan besar (UMB) porsinya kurang dari dua

persen dari jumlah seluruh usaha. Dari sisi ketenagakerjaan, UMK mempunyai keunggulan dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah melimpah dan tidak banyak memerlukan spesifikasi keahlian. Kondisi ini bisa menjadi peluang bagi stakeholder untuk memberikan pembinaan ketrampilan teknis usaha.

Tabel 4.22. Sebaran Perusahaan/Usaha non-Pertanian di D.I. Yogyakarta menurut Skala Usaha, 2016

Skala Usaha	Perusahaan/Usaha (Unit)		Tenaga Kerja (Orang)	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Usaha Mikro-Kecil (UMK)	524.935	98,36	1.044.498	78,98
Usaha Menengah-Besar (UMB)	8.735	1,64	278.044	21,02
Jumlah	533.670	100,00	1.322.542	100,00

Sumber: BPS Provinsi DIY (diolah dari hasil Sensus Ekonomi 2016)



Sumber: BPS Provinsi DIY (diolah dari hasil Sensus Ekonomi 2016)

Gambar 4.8. Distribusi Usaha/Perusahaan Nonpertanian di D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota, 2016 (persen)

Secara spasial, jumlah perusahaan/usaha masih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul (Gambar 4.8). Total perusahaan/usaha non-pertanian di D.I. Yogyakarta ada sebanyak 533.670 unit. Sekitar 27,25 persen di antaranya berada di Kabupaten Sleman, sebesar 26,49 persen berlokasi di Kabupaten Bantul, dan sebesar 21,06 persen berada di Kabupaten Gunungkidul. Sementara itu sisanya tersebar di Kota Yogyakarta dan Kabupaten

Kulon Progo masing-masing sebesar 13,08 persen. Terkait dengan kegiatan investasi, sudah semestinya kegiatan investasi diarahkan ke seluruh wilayah D.I. Yogyakarta sehingga pemerataan kegiatan ekonomi antar wilayah sesuai dengan potensi masing-masing dapat dicapai. Dengan pemerataan tersebut diharapkan mampu mempercepat dalam mendorong roda perekonomian D.I. Yogyakarta agar kegiatan ekonomi dapat menguat di seluruh penjuru wilayah sehingga dapat berdampak positif untuk mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat.

4.6. Hubungan ICOR, Gross Domestic Investment, Gross Domestic Saving, Tingkat pertumbuhan ekonomi, dan Inflasi

Hubungan ICOR, Investasi Bruto (*Gross Domestic Investment*) dan Tabungan Bruto (*Gross Domestic Saving*) dapat diturunkan dari persamaan identitas model makro ekonomi berikut:

$$Y = C + G + I + (X-M)$$

keterangan:

Y = Pendapatan Nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB)

C = Konsumsi Rumah Tangga

G = Konsumsi Pemerintah

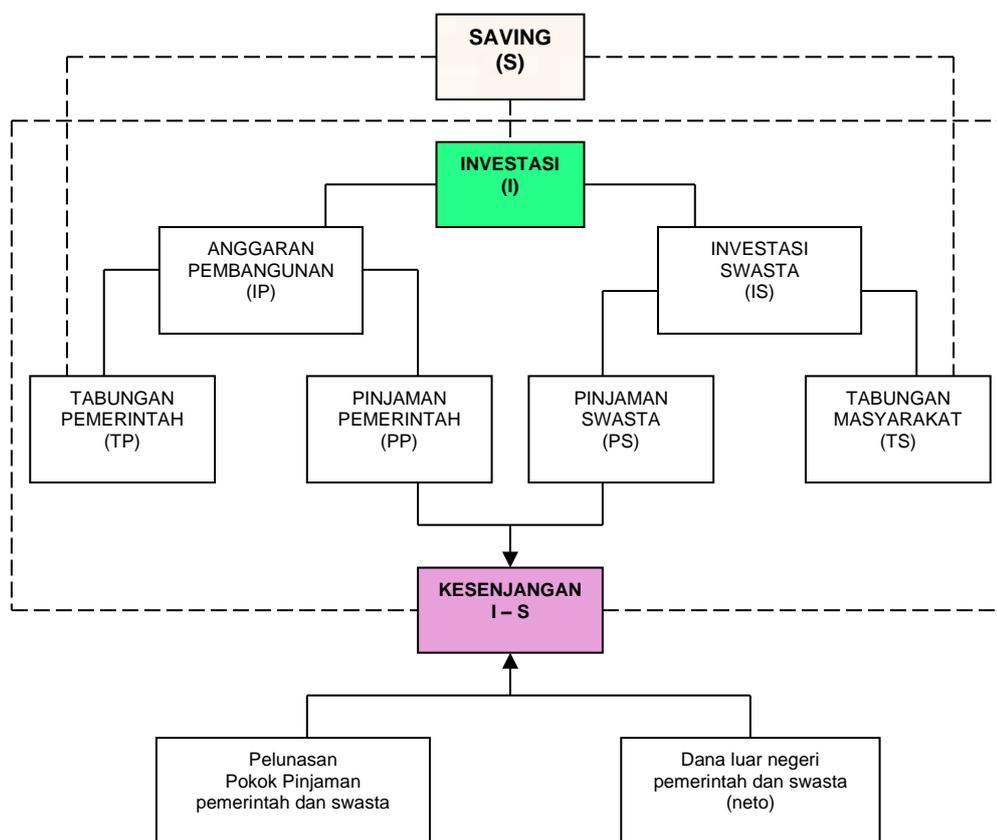
I = Investasi

X = Ekspor

M = Impor

Berdasarkan persamaan di atas dapat dikatakan bahwa Pendapatan Nasional (PDB) suatu negara atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah digunakan untuk konsumsi rumah tangga (C), konsumsi pemerintah (G), investasi (I), dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor/X – M). Rasio investasi (I) terhadap PD(R)B (Y) mencerminkan porsi investasi domestik bruto (*Gross Domestic Investment/GDI*); sedangkan rasio tabungan (S) terhadap PD(R)B (Y) mencerminkan porsi tabungan domestik bruto (*Gross Domestic Saving/GDS*), di mana tabungan sama dengan investasi ditambah ekspor neto {I+(X-M)}.

Untuk mengetahui kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan dapat dilihat pada Gambar 4.9. Teori **Two Gap Model** menunjukkan adanya **defisit** terhadap sumber pembiayaan pembangunan karena tabungan lebih kecil dari kebutuhan investasi (**I-S = Resource Gap**) (Widodo, 1990).



Sumber: Widodo, 1990

Gambar 4.9. Kesenjangan Investasi dan Tabungan

Dari Gambar 4.9, secara ringkas dapat diuraikan bahwa investasi diperlukan untuk memenuhi anggaran pembangunan seperti yang tercantum dalam APBN/APBD dan kebutuhan investasi oleh swasta. Kebutuhan ini dibiayai dengan tabungan pemerintah dalam APBN/APBD, jika belum mencukupi maka dipenuhi melalui pinjaman atau bantuan luar negeri. Selain itu juga dipenuhi dari tabungan masyarakat dan pinjaman swasta. Pinjaman pemerintah bersama-sama dengan pinjaman swasta inilah merupakan kesenjangan antara investasi dengan tabungan.

**Tabel 4.23. Perkembangan ICOR, GDI, GDS, LPE, dan Inflasi
D.I. Yogyakarta, 2015-2019**

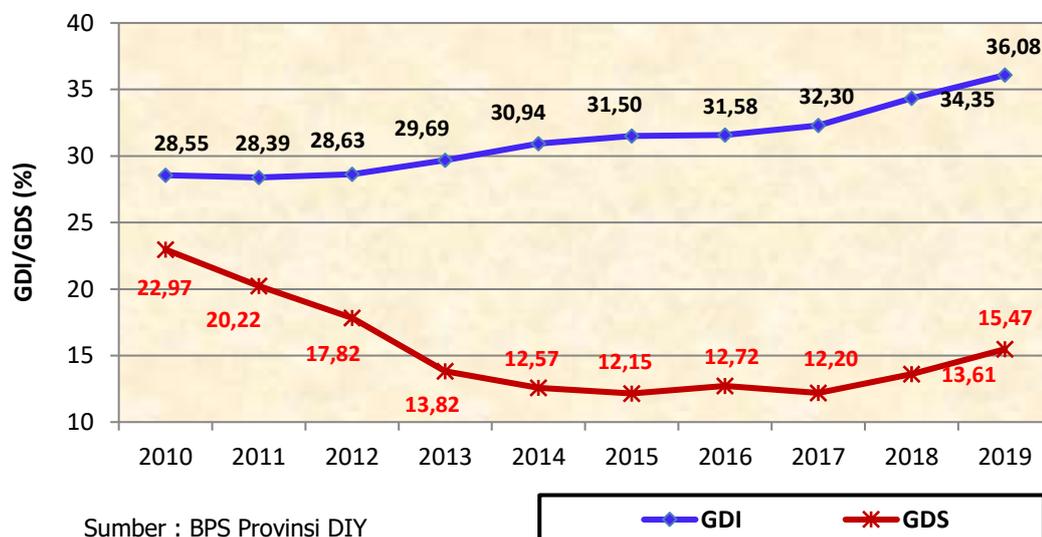
Indikator	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ICOR	5,91	5,86	5,60	4,96	4,81
GDI	31,50	31,58	32,30	34,35	36,08
GDS	12,15	12,72	12,20	13,61	15,47
LPE	4,95	5,05	5,26	6,20	6,60
IS-Gap(%)	19,35	18,86	20,11	20,73	20,62
Nominal IS-Gap (miliar Rp.)	19.626	20.739	23.951	26.929	29.152
INFLASI	3,09	2,29	4,20	2,66	2,77

Sumber : BPS Provinsi DIY (Diolah)

Keterangan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Perkembangan angka ICOR, GDI, GDS, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi dapat dilihat pada Tabel 4.23. Ada beberapa kecenderungan utama dari perkembangan indikator di atas. Pertama, dari periode 2015 sampai dengan 2019 ICOR cenderung menurun yang berarti proses produksi cenderung lebih efisien. Kedua, *Gross Domestic Investment* (GDI) juga cenderung meningkat. Hal ini merupakan sinyal yang cukup baik karena menunjukkan porsi PDRB yang diinvestasikan kembali semakin meningkat. Di sisi lain, perkembangan *Gross Domestic Saving* (GDS) juga cenderung meningkat kecuali pada tahun 2017 yang sempat melambat. Dengan kondisi GDI dan GDS yang berkebalikan arah tersebut menyebabkan gap antara GDI dan GDS (*I-S Gap*) masih cukup lebar. *I-S Gap* menggambarkan kesenjangan antara investasi dan tabungan suatu daerah. Dengan demikian, kondisi dimana *I-S Gap* yang cukup lebar menggambarkan porsi pembiayaan investasi dari luar D.I. Yogyakarta cenderung meningkat meskipun pada tahun 2019 ada peningkatan tabungan di D.I. Yogyakarta. Semakin besar *I-S gap* akan semakin besar pula porsi investasi yang akan masuk dari luar D.I. Yogyakarta. Sebagai contoh, pembangunan hotel-hotel besar, mall atau super mall, dan kemungkinan besar investasinya berasal dari luar D.I. Yogyakarta. Ditambah lagi dengan adanya megaproyek bandara yang semakin memberi angin segar bagi para investor. Ketiga, ada kecenderungan pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta semakin meningkat selama periode 2015-2019 dari 4,95 persen pada tahun 2015 menjadi 6,60

persen pada tahun 2019. Keempat, adanya kecenderungan inflasi berada pada level rendah selama lima tahun terakhir.



Gambar 4.10. Perkembangan GDI dan GDS di D.I.Yogyakarta, 2010-2019

Pembangunan suatu wilayah membutuhkan adanya investor yang akan menanamkan modal untuk pemenuhan pembiayaan. Investasi tersebut dapat berasal dari daerah sendiri maupun dari daerah lain. Selama tahun 2010-2019 ada kecenderungan penurunan pada kemampuan untuk berinvestasi dengan modal sendiri di D.I. Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan gap GDI dan GDS yang cenderung melebar (Gambar 4.10). meskipun pada tahun 2019 ada peningkatan tabungan dari dalam wilayah D.I. Yogyakarta sendiri tetapi belum mampu untuk memperkecil kesenjangan antara kebutuhan investasi dengan nilai tabungan yang ada. Jika dilihat dari tabel sebelumnya menunjukkan jika nominal *I-S Gap* yang semakin besar dari 5,83 triliun rupiah pada tahun 2011 menjadi 29,15 triliun rupiah pada tahun 2019.

Untuk mengatasi kebutuhan investasi wilayah D.I. Yogyakarta perlu kerja kompak antara pemerintah dan masyarakat D.I. Yogyakarta sendiri. Pemerintah daerah sebagai perangkat daerah bertugas untuk menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan mempunyai peranan penting dalam kegiatan investasi. Salah satunya adalah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif yang akan mendorong investor luar untuk masuk ke wilayah D.I.

Yogyakarta. Investasi membutuhkan iklim yang kondusif dan transparansi dalam hal legalitas pelayanan dan prosedur investasi. Daerah harus mampu membuat *business planning map* tentang peluang investasi daerahnya berdasarkan *feasibility-study* yang matang. Perlu dibentuk kawasan-kawasan investasi berdasarkan peruntukannya. Selain itu, juga diperlukan pembenahan kualitas dan kuantitas infrastruktur.

Selain menciptakan iklim investasi yang kondusif, pemerintah perlu menciptakan daya saing investasi. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi secara instan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi daya saing investasi antara lain: ekonomi, sosial, politik, budaya, dan kelembagaan, serta infrastruktur diyakini merupakan beberapa faktor pembentuk daya saing investasi suatu negara atau daerah. Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) membutuhkan adanya iklim usaha yang kondusif, kemudahan akses serta kejelasan prosedur perijinan dalam kegiatan investasi. Kondisi makro ekonomi daerah yang bersangkutan seperti tingkat bunga, aturan perpajakan, dan laju inflasi juga mempengaruhi iklim investasi daerah (Mankiw, 2007). Sementara itu, kerja kompak antara pemerintah dan masyarakat D.I. Yogyakarta diperlukan untuk memacu jiwa *entrepreneurship* dari masyarakat D.I. Yogyakarta sehingga berani melakukan investasi yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja dan ikut menggerakkan roda perekonomian daerah.

BAB V PENUTUP



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian tentang penghitungan ICOR di D.I. Yogyakarta selama periode 2015-2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Selama periode 2015-2019 pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta rata-rata mencapai 5,77 persen per tahun. Lapangan usaha dengan laju pertumbuhan rata-rata tertinggi adalah konstruksi yang tumbuh sebesar 9,91 persen per tahun; disusul oleh informasi dan komunikasi sebesar 7,09 persen; penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,84 persen; dan pengadaan listrik dan gas sebesar 6,65 persen. Sementara itu, lapangan usaha dengan laju pertumbuhan rata-rata terendah adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh 1,64 persen per tahun. Lapangan usaha yang lain tumbuh pada kisaran 4-5 persen per tahun.
2. Investasi di D.I. Yogyakarta selama periode pengamatan terus meningkat. Pada tahun 2015 nilai investasi tercatat sebesar 31,95 triliun rupiah atas dasar harga berlaku dan 23,26 triliun rupiah atas dasar harga konstan 2010. Kemudian, pada tahun 2019 meningkat menjadi 51,02 triliun rupiah atas dasar harga berlaku dan 31,11 triliun rupiah atas dasar harga konstan 2010. Ditinjau menurut besarnya sumbangan, 5 (lima) lapangan usaha yang memberikan sumbangan terbesar selama periode 2015-2019 secara berturut-turut adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 13,49 persen; kemudian diikuti oleh transportasi dan pergudangan sebesar 13,51 persen; konstruksi sebesar 12,61 persen; penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 11,82 persen; dan jasa lainnya sebesar 10,97 persen. Sementara lapangan usaha yang lain sumbangannya berkisar antara 6 hingga 10 persen. Jika ditinjau dari sisi spasial, secara rata-rata investasi terbesar terjadi di Kabupaten Sleman dengan kontribusi sekitar 40,21 persen per tahun; kemudian diikuti oleh Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo dengan kontribusi

masing-masing 22,40 persen; 15,17 persen; 11,69 persen; dan 10,52 persen.

3. Hasil penghitungan ICOR total D.I. Yogyakarta pada tahun 2019 sebesar 4,81. Angka ICOR ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang nilainya sebesar 4,96. Di sisi lain, tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mencapai 6,60 persen, meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 6,20 persen. Jika dibandingkan dengan ICOR provinsi lain di kawasan Jabalnusra maka ICOR D.I. Yogyakarta merupakan yang terendah, demikian juga bila dibandingkan dengan angka ICOR nasional yang sebesar 7,11.
4. Hasil penghitungan ICOR baik dengan metode standar maupun akumulasi, dengan dan tanpa memperhitungkan perubahan inventori menghasilkan angka yang tidak jauh berbeda. Lapangan usaha dengan ICOR di bawah level 4 yaitu: pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; jasa keuangan dan asuransi; serta real estate. Sementara lapangan usaha dengan ICOR di atas 10 adalah pengadaan listrik dan gas serta transportasi dan pergudangan serta.
5. Dalam periode 2015-2019, rata-rata ICOR Kabupaten Sleman mempunyai nilai tertinggi yaitu sebesar 6,35; diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 5,41; Kabupaten Kulon Progo sebesar 5,26; Kota Yogyakarta 4,87; dan terendah adalah Kabupaten Bantul sebesar 4,76.
6. Kebutuhan investasi dapat dihitung berdasarkan target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dan laju inflasi. Target pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta pada tahun 2020 pada tingkat moderat ditetapkan sebesar 2,39 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut diperlukan investasi sebesar 23,33 triliun rupiah. Pada tahun 2021, dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79 persen maka diperlukan investasi sebesar 50,25 triliun rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2022 diperlukan investasi sebesar 55,61 triliun rupiah untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 4,82 persen.

7. Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 1,51 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut diperlukan investasi sebesar 5,72 triliun rupiah. Pada tahun 2021, dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 3,90 persen maka diperlukan investasi sebesar 15,80 triliun rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2022 diperlukan investasi sebesar 18,44 triliun rupiah untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 4,16 persen.
8. *Gross Domestic Investment* (GDI) selama periode 2015-2019 cenderung meningkat, sementara *Gross Domestic Saving* (GDS) menurun selama 2015-2017 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018-2019. *Gap* antara GDI dan GDS (*I-S Gap*) selama 2015-2019 berfluktuasi sejalan dengan pergerakan GDS.

5.2. Rekomendasi

1. Untuk memenuhi kebutuhan investasi di wilayah D.I. Yogyakarta diperlukan peran serta pihak swasta dan rumah tangga karena anggaran pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota relatif terbatas. Untuk menarik investor swasta baik dari dalam maupun luar provinsi serta luar negeri, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif.
2. ICOR merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat efisiensi investasi. Namun demikian, masih perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif mengenai karakteristik setiap lapangan usaha yang berkembang di wilayah D.I. Yogyakarta untuk menentukan perencanaan investasi yang tepat.
3. Dengan mempertimbangkan nilai ICOR yang relatif kecil dan penyerapan tenaga kerja prioritas investasi bisa dilakukan pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan industri pengolahan.

4. Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, memerlukan kebijakan yang bersifat komprehensif dalam rangka mengalokasikan investasi ke daerah-daerah yang selama ini masih minim investasi sehingga akan mengurangi ketimpangan investasi antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 1988. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Pertama. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- BPS. 2004. *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri Pengolahan Tahun 1990-2002*. Jakarta
- BPS DIY. 2007. *Analisis Profil Perusahaan/Usaha Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2006. Hasil Listing Sensus Ekonomi 2006*. Yogyakarta
- BPS DIY. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DIY Menurut Lapangan Usaha 2011-2015*. Yogyakarta.
- BPS DIY. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DIY Menurut Pengeluaran 2011-2015*. Yogyakarta.
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2003. *ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 1998-2002*. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2009. *ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2004-2008*. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2010. *ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2005-2009*. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2011. *Analisis Pembentukan Investasi Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010*. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2011. *ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2006-2010*. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2012. *Analisis ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2007-2011*. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2012. *Tabel Input-Output Daerah Istimewa Yogyakarta 2010*. Yogyakarta.
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2013. *Analisis ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2008-2012*. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2014. *Analisis ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2009-2013*. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2015. *Analisis ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2014*. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2016. *Analisis ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011-2015*. Yogyakarta

- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2017. Analisis ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2012-2016. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2018. Analisis ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2017. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2019. Analisis ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014-2018. Yogyakarta
- Effendi, D.P. 1992. ICOR. Stok Kapital. dan ILOR. BPS. Jakarta
- Glassburner, B dan A. Chandra. 1979. Teori dan Kebijakan Ekonomi Makro. LP3ES. Jakarta
- Hess, P. and C. Ross. 1997. Economic Development; Theories. Evidence. and Policies. The Dryden Press. Orlando.
- Mankiw, N.G. 2007. Macroeconomics. Sixth Edition. Terjemahan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Sutomo, S. 2015. Sistem Data dan Perangkat Analisis Ekonomi Makro. Corleone Books – Publishing House of Litera Media. Bandung.
- Todaro, M.P. 2003. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Alih Bahasa: Aminuddin dan Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Widodo, Hg.S.T. 1990. Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia. Kanisius. Yogyakarta

LAMPIRAN



Lampiran 1. PDRB D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2015-2019 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*)	2019**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.793.840	11.456.173	11.932.976	12.708.214	13.255.031
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	9.442.590	10.036.121	10.423.666	11.157.338	11.656.876
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	902.903	955.185	1.004.945	1.020.262	1.086.968
c. Perikanan	448.346	464.867	504.365	530.613	511.187
2. Pertambangan dan Penggalan	573.133	593.156	615.943	687.661	722.619
3. Industri Pengolahan	13.303.468	14.547.348	15.635.872	16.869.996	18.172.378
4. Pengadaan Listrik dan Gas	118.012	141.794	173.689	186.513	202.276
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	109.697	114.765	121.272	128.125	139.653
6. Konstruksi	9.499.917	10.286.734	11.310.871	13.351.678	15.715.532
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.342.646	9.297.746	10.220.360	11.156.434	11.981.014
8. Transportasi dan Pergudangan	5.763.846	6.248.794	6.783.602	7.469.964	7.975.661
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.383.402	11.255.100	12.304.099	13.273.486	14.636.463
a. Penyediaan Akomodasi	2.050.489	2.273.996	2.596.088	2.952.305	3.564.266
b. Penyediaan Makan Minum	8.332.913	8.981.104	9.708.011	10.321.181	11.072.197
10. Informasi dan Komunikasi	8.244.242	8.957.494	9.785.905	10.523.890	11.283.225
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.022.438	4.334.779	4.642.315	5.106.466	5.649.248
a. Jasa Perantara Keuangan	3.052.521	3.273.041	3.474.376	3.842.639	4.244.913
b. Lainnya	969.917	1.061.737	1.167.938	1.263.827	1.404.335
12. Real Estate	7.116.820	7.800.511	8.368.917	9.022.612	9.895.072
13. Jasa Perusahaan	1.048.359	1.115.852	1.209.402	1.309.148	1.437.498
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	8.379.232	9.217.108	10.213.350	10.949.666	11.631.325
15. Jasa Pendidikan	8.598.744	9.010.144	9.697.395	10.533.809	11.508.225
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.553.551	2.759.865	3.003.721	3.220.940	3.535.221
17. Jasa lainnya	2.589.171	2.824.990	3.109.029	3.375.735	3.659.740
PDRB	101.440.518	109.962.354	119.128.719	129.874.338	141.400.183

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Lampiran 2. PDRB D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha, 2015-2019 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*)	2019**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.667.602	7.779.801	7.930.315	8.101.333	8.184.692
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	6.666.703	6.766.495	6.883.678	7.069.776	7.170.746
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	700.237	708.450	728.827	711.209	712.442
c. Perikanan	300.662	304.857	317.809	320.348	301.504
2. Pertambangan dan Penggalian	471.323	473.299	489.349	541.184	557.653
3. Industri Pengolahan	10.693.036	11.234.473	11.878.962	12.487.005	13.201.887
4. Pengadaan Listrik dan Gas	127.701	145.910	151.681	156.706	165.217
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	85.260	87.268	90.289	94.923	103.373
6. Konstruksi	7.826.701	8.250.608	8.828.648	9.984.760	11.421.140
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.944.903	7.366.325	7.787.541	8.219.289	8.643.438
8. Transportasi dan Pergudangan	4.541.309	4.750.173	4.976.406	5.304.844	5.493.402
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.842.143	8.274.501	8.788.711	9.383.603	10.217.677
a. Penyediaan Akomodasi	1.450.436	1.568.774	1.743.404	1.971.041	2.342.698
b. Penyediaan Makan Minum	6.391.707	6.705.728	7.045.307	7.412.562	7.874.979
10. Informasi dan Komunikasi	8.891.145	9.630.639	10.222.383	10.884.533	11.695.492
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.060.733	3.213.478	3.303.798	3.506.588	3.805.396
a. Jasa Perantara Keuangan	2.273.369	2.378.617	2.420.775	2.577.284	2.801.423
b. Lainnya	787.363	834.861	883.022	929.303	1.003.973
12. Real Estate	6.082.489	6.394.249	6.708.239	7.079.839	7.499.627
13. Jasa Perusahaan	991.564	1.026.163	1.086.912	1.146.812	1.224.235
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6.304.911	6.656.183	6.956.541	7.239.152	7.477.921
15. Jasa Pendidikan	7.444.277	7.672.850	8.096.346	8.583.074	9.146.784
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.210.406	2.310.356	2.445.241	2.593.233	2.764.571
17. Jasa lainnya	2.288.950	2.419.533	2.558.882	2.717.386	2.887.200
PDRB	83.474.452	87.685.810	92.300.244	98.024.264	104.489.706

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 3. Distribusi PDRB D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2015-2019 (persen)

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*)	2019**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,64	10,42	10,02	9,79	9,37
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	9,31	9,13	8,75	8,59	8,24
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,89	0,87	0,84	0,79	0,77
c. Perikanan	0,44	0,42	0,42	0,41	0,36
2. Pertambangan dan Penggalan	0,56	0,54	0,52	0,53	0,51
3. Industri Pengolahan	13,11	13,23	13,13	12,99	12,85
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,13	0,15	0,14	0,14
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
6. Konstruksi	9,37	9,35	9,49	10,28	11,11
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,22	8,46	8,58	8,59	8,47
8. Transportasi dan Pergudangan	5,68	5,68	5,69	5,75	5,64
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,24	10,24	10,33	10,22	10,35
a. Penyediaan Akomodasi	2,02	2,07	2,18	2,27	2,52
b. Penyediaan Makan Minum	8,21	8,17	8,15	7,95	7,83
10. Informasi dan Komunikasi	8,13	8,15	8,21	8,10	7,98
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,97	3,94	3,90	3,93	4,00
a. Jasa Perantara Keuangan	3,01	2,98	2,92	2,96	3,00
b. Lainnya	0,96	0,97	0,98	0,97	0,99
12. Real Estate	7,02	7,09	7,03	6,95	7,00
13. Jasa Perusahaan	1,03	1,01	1,02	1,01	1,02
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	8,26	8,38	8,57	8,43	8,23
15. Jasa Pendidikan	8,48	8,19	8,14	8,11	8,14
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,52	2,51	2,52	2,48	2,50
17. Jasa lainnya	2,55	2,57	2,61	2,60	2,59
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Lampiran 4. Tingkat Pertumbuhan PDRB D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha, 2015-2019 (persen)

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*)	2019**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,11	1,46	1,93	2,16	1,03
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	1,94	1,50	1,73	2,70	1,43
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,83	1,17	2,88	-2,42	0,17
c. Perikanan	4,21	1,40	4,25	0,80	-5,88
2. Pertambangan dan Penggalan	0,13	0,42	3,39	10,59	3,04
3. Industri Pengolahan	2,13	5,06	5,74	5,12	5,73
4. Pengadaan Listrik dan Gas	2,19	14,26	3,96	3,31	5,43
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,90	2,36	3,46	5,13	8,90
6. Konstruksi	4,24	5,42	7,01	13,10	14,39
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,19	6,07	5,72	5,54	5,16
8. Transportasi dan Pergudangan	3,73	4,60	4,76	6,60	3,55
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,77	5,51	6,21	6,77	8,89
a. Penyediaan Akomodasi	7,17	8,16	11,13	13,06	18,86
b. Penyediaan Makan Minum	5,46	4,91	5,06	5,21	6,24
10. Informasi dan Komunikasi	5,11	8,32	6,14	6,48	7,45
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,27	4,99	2,81	6,14	8,52
a. Jasa Perantara Keuangan	8,97	4,63	1,77	6,47	8,70
b. Lainnya	6,30	6,03	5,77	5,24	8,03
12. Real Estate	6,05	5,13	4,91	5,54	5,93
13. Jasa Perusahaan	7,31	3,49	5,92	5,51	6,75
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,57	5,57	4,51	4,06	3,30
15. Jasa Pendidikan	7,28	3,07	5,52	6,01	6,57
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,15	4,52	5,84	6,05	6,61
17. Jasa lainnya	8,00	5,70	5,76	6,19	6,25
PDRB	4,95	5,05	5,26	6,20	6,60

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 5. PDRB D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Juta Rupiah)

Komponen	2015	2016	2017	2018*)	2019**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	68.730.528	74.429.796	81.335.810	86.753.197	92.459.989
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	3.171.193	3.225.070	3.756.395	4.095.046	4.613.732
3. Konsumsi Pemerintah	17.214.154	18.321.761	19.508.072	21.346.113	22.458.454
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	30.798.881	33.428.978	37.111.436	43.173.678	49.519.128
5. Perubahan Inventori/Stok	1.151.797	1.295.788	1.368.184	1.435.491	1.501.126
Investasi (4 + 5)	31.950.678	34.724.766	38.479.620	44.609.170	51.020.254
6. Ekspor Barang dan Jasa	58.504.294	64.728.257	70.150.254	72.570.564	77.445.417
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	78.130.328	85.467.297	94.101.432	99.499.751	106.597.662
PDRB	101.440.518	109.962.354	119.128.719	129.874.338	141.400.183

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Lampiran 6. PDRB D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Juta Rupiah)

Komponen	2015	2016	2017	2018*)	2019**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	50.193.386	52.619.164	55.364.064	57.552.317	59.745.355
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	2.384.374	2.362.344	2.589.250	2.657.427	2.911.995
3. Konsumsi Pemerintah	12.719.134	12.949.746	13.104.559	13.559.566	13.983.252
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	22.286.615	23.616.948	24.791.862	27.313.862	29.973.484
5. Perubahan Inventori/Stok	974.645	1.045.164	1.066.314	1.104.088	1.137.665
Investasi (4 + 5)	23.261.260	24.662.112	25.858.176	28.417.951	31.111.149
6. Ekspor Barang dan Jasa	41.978.121	43.866.510	46.523.416	47.088.094	48.240.440
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	47.061.823	48.774.066	51.139.221	51.251.090	51.502.485
PDRB	83.474.452	87.685.810	92.300.244	98.024.264	104.489.706

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Lampiran 7. Distribusi PDRB D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2015-2019 (persen)

Komponen	2015	2016	2017	2018*)	2019**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	67,75	67,69	68,28	66,80	65,39
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	3,13	2,93	3,15	3,15	3,26
3. Konsumsi Pemerintah	16,97	16,66	16,38	16,44	15,88
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	30,36	30,40	31,15	33,24	35,02
5. Perubahan Inventori/Stok	1,14	1,18	1,15	1,11	1,06
Investasi (4 + 5)	31,50	31,58	32,30	34,35	36,08
6. Ekspor Barang dan Jasa	57,67	58,86	58,89	55,88	54,77
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	77,02	77,72	78,99	76,61	75,39
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Lampiran 8. Distribusi PDRB D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2015-2019 (persen)

Komponen	2015	2016	2017	2018*)	2019**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	60,13	60,01	59,98	58,71	57,18
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	2,86	2,69	2,81	2,71	2,79
3. Konsumsi Pemerintah	15,24	14,77	14,20	13,83	13,38
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	26,70	26,93	26,86	27,86	28,69
5. Perubahan Inventori/Stok	1,17	1,19	1,16	1,13	1,09
Investasi (4 + 5)	27,87	28,13	28,02	28,99	29,77
6. Ekspor Barang dan Jasa	50,29	50,03	50,40	48,04	46,17
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	56,38	55,62	55,41	52,28	49,29
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Lampiran 9. PMTB + Perubahan Inventori, ICOR, dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa, 2019

Provinsi	ADHK 2010 (Miliar Rp.)		% thd PDRB		ICOR		TPE (%)
	PMTB	PMTB + Δ Inventori	PMTB	PMTB + Δ Inv.	PMTB	PMTB + Δ Inv.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
DKI Jakarta	737.770	768.190	39,25	41,13	7,31	7,61	6,04
Jawa Barat	352.312	395.473	25,27	28,90	4,63	5,20	5,43
Jawa Tengah	285.045	293.369	32,62	33,97	6,01	6,19	5,32
D.I. Yogyakarta	27.314	28.418	33,24	34,35	4,77	4,96	5,36
Jawa Timur	431.922	450.184	28,34	29,64	5,30	5,53	5,49
Banten	135.166	135.272	31,43	31,45	5,66	5,67	5,57
Bali	50.837	51.084	30,63	30,92	5,54	5,57	6,06
Nusa Tenggara Barat	30.007	30.337	38,11	38,82	-7,12	-7,19	5,35
Nusa Tenggara Timur	31.883	32.413	47,63	48,52	9,90	10,07	5,07
Indonesia	3.443.242	3.640.612	3,23	5,51	6,72	7,10	5,04

Sumber: BPS (Diolah)

Keterangan : TPE = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Lampiran 10. PDRB Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Berlaku, 2015-2019 (juta rupiah)

Kabupaten/Kota/ Provinsi	2015	2016	2017	2018*)	2019**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	7.671.548	8.312.005	9.060.465	10.318.259	12.016.935
Bantul	19.325.203	20.913.086	22.611.707	24.443.274	26.345.477
Gunungkidul	13.798.657	14.980.281	16.199.842	17.540.149	18.889.873
Sleman	33.826.505	36.932.843	40.047.864	43.793.254	47.580.784
Yogyakarta	26.791.936	28.895.413	31.309.045	33.818.853	36.599.057
D.I. Yogyakarta	101.440.518	109.962.354	119.128.719	129.874.338	141.400.183

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Lampiran 11. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta, 2015-2019 (persen)

Kabupaten/Kota/ Provinsi	2015	2016	2017	2018*)	2019**)	Rata-rata 2015-2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	4,62	4,76	5,97	10,84	13,49	8,71
Bantul	4,97	5,05	5,10	5,47	5,53	5,29
Gunungkidul	4,82	4,88	5,01	5,16	5,33	5,09
Sleman	5,18	5,22	5,34	6,42	6,49	5,86
Yogyakarta	5,09	5,11	5,24	5,49	5,96	5,45
D.I. Yogyakarta	4,95	5,05	5,26	6,20	6,60	5,77

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Ket: * angka sementara; ** angka sangat sementara

Lampiran 12. PDRB Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha se-D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Berlaku, 2019 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	Kulonprogo	Bantul	Gunung- kidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.906.137	3.442.614	4.435.362	3.403.633	52.991
2. Pertambangan dan Penggalian	178.401	135.245	224.102	183.677	1.184
3. Industri Pengolahan	1.331.235	3.999.979	1.789.517	6.244.767	4.823.506
4. Pengadaan Listrik dan Gas	10.022	37.927	17.866	54.690	81.767
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13.893	20.716	30.786	21.902	51.778
6. Konstruksi	2.397.087	2.569.857	1.955.967	5.978.725	2.872.931
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.484.752	2.277.891	1.778.363	3.704.461	2.742.495
8. Transportasi dan Pergudangan	906.133	1.278.988	949.017	3.357.229	1.491.284
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	413.160	3.140.309	1.115.778	4.929.770	5.028.895
10. Informasi dan Komunikasi	515.236	1.915.285	1.359.282	3.747.296	3.754.663
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	347.719	775.317	451.050	1.575.357	2.489.417
12. Real Estate	359.287	1.767.422	700.940	3.709.644	3.348.084
13. Jasa Perusahaan	29.365	128.329	83.039	797.241	396.039
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	962.944	2.010.644	1.784.315	3.174.206	3.703.369
15. Jasa Pendidikan	613.341	1.816.960	1.173.154	4.511.265	3.376.944
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	154.736	488.347	379.949	1.118.210	1.388.276
17. Jasa lainnya	393.486	539.647	661.387	1.068.711	995.433
PDRB	12.016.935	26.345.477	18.889.873	47.580.784	36.599.057

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Lampiran 13. Kontribusi Lapangan Usaha Dominan menurut Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta, 2015-2019 (persen)

Kabupaten/ Kota	Lapangan Usaha	Kontribusi (persen)		
		2019	2017	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	1. Konstruksi*)	19,95	9,10	8,47
	2. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,86	19,04	20,42
	3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	12,36	13,94	13,15
Bantul	1. Industri Pengolahan	15,18	15,25	15,06
	2. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,07	13,85	14,60
	3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,92	11,73	11,59
Gunungkidul	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,48	24,47	25,62
	2. Konstruksi	10,35	9,65	9,41
	3. Industri Pengolahan**)	9,47	9,48	9,31
Sleman	1. Industri Pengolahan	13,12	13,30	13,43
	2. Konstruksi	12,57	10,93	10,85
	3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,36	10,29	10,20
Yogyakarta	1. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,74	13,55	13,22
	2. Industri Pengolahan	13,18	13,47	13,66
	3. Informasi dan Komunikasi	10,26	10,45	10,33

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Catatan:

*) Untuk Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 dan tahun 2017, lapangan usaha dengan kontribusi terbesar adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan.

***) Untuk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 dan 2017, lapangan usaha dengan kontribusi terbesar ke tiga adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.

